



BUDIDAYA UDANG PERBASIS KAWASAN



LAPORAN KINERJA 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

KATA PENGANTAR

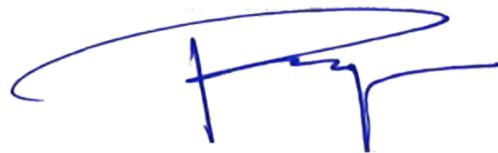
Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan suatu bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berisikan tentang capaian atas target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sebagai salah satu instrumen penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan transparansi serta pertanggungjawaban dan wujud pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kinerja organisasi diukur atas dasar pencapaian indikator kinerja yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023.

Kami menyadari penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja ke depan. Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan peran strategis seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya semakin meningkat sehingga dapat mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Jakarta 10 Februari 2024

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,



Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc

PERNYATAAN TELAH DI REVIU



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16

JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3522805, FAKSIMILE (021) 3522805

LAMAN www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami tersebut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2024

Inspektur III

Wahjudi Poerwanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TELAH DI REVIU	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Tugas dan Fungsi.....	3
1.4. Sumberdaya Manusia	5
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya	6
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	8
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Budi Daya.....	8
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2023.....	11
Tabel 1. Keselarasan target IKU Pada Renstra dan PK 2023.....	11
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.2. Analisis Capaian Kinerja	23
SS.1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budi Daya.....	23
SS.2. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat.....	28
SS.3. Kawasan Perikanan Budi Daya yang Berkelanjutan	34
SS.4. Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya.....	36
SS.5. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya	45
SS.6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	48
3.2. Efisiensi	70
3.3. Kinerja Anggaran.....	71
BAB IV. PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

1. Keselarasan target IKU Pada Renstra dan PK 2023.....	11
2. Capaian Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2023.....	22
3. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Januari - Desember Tahun 2023.....	24
4. Indeks Konsumsi Rumah Tangga Januari - Desember Tahun 2023.....	25
5. Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Januari - Desember Tahun 2023 ...	26
6. Capaian Tenaga Kerja Terlibat Bidang Perikanan Budidaya.....	31
7. Perolehan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budidaya Berkelanjutan (Kluster) Tahun 2023	34
8. Perkembangan produksi perikanan budidaya Tahun 2020-2023	36
9. Produksi Ikan Hias Menurut Komoditas Tahun 2023 ** (1000 ekor)	45
10. Capaian Indikator Kinerja Prosentase Jumlah Sampel Residu yang Memenuhi Ketentuan (bebas residu) Tahun 2023	46
11. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2021 dan 2022	72
12. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja Tahun 2022 dan 2023	72

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Ditjen Perikanan Budi Daya.....	4
2. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan Unit Kerja.....	5
3. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan tingkat pendidikan.....	6
4. Perjanjian Kinerja awal Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023.....	17
5. PK Revisi November 2023	20
6. Capaian Kinerja Tahun 2023	21
7. Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Bulan Januari - Desember Tahun 2023	24
8. Peta Nilai Tukar Pembudidaya Ikan bulan Januari - Desember Tahun 2023	26
9. Struktur Biaya Operasional Pembudidaya Ikan Beberapa Komoditas Utama	28
10. Grafik perkembanganProduksi Udang 2019-2023.....	37
11. Grafik perkembangan produksi kerapu 2019-2023	37
12. Grafik perkembangann produksi kakap 2019-2023.....	38
13. Grafik perkembangan Bandeng 2019-2023.....	38
14. Grafik perkembangan patin 2019-2023.....	39
15. Grafik perkembangan Nila 2019-2023.....	40
16. Grafik perkembangan Mas 2019-2023	41
17. Grafik perkembangan Lele 2019-2023.....	41
18. Grafik perkembanga Gurame 2019-2023	42
19. Grafik perkembangan rumput laut 2023	42
20. Grafik Perbandingan Capaian IP ASN Lingkup KKP Tahun 223.....	49
21. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPB dibandingkan realisasi anggaran TA. 2022	52
22. Grafik capaian Nilai PM SAKIP Lingkup KKP Tahun 2023	54
23. Grafik capaian SPIP lingkup KKP Tahun 2023.....	55
24. Perbandingan capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2023	57
25. Perbandingan Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2023	58
26. Capaian Capaian Nilai Hasil Akhir Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP.....	60
27. Perbandingan capaian Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2023.....	62
28. Perbandingan capaian IKPA lingkup KKP Tahun 2023.....	63
29. Perbandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran lingkup KKP Tahun 2023	65
30. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran lingkup KKP tahun 2023	66
31. Grafik Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan BMN lingkup KKP tahun 2023.....	68

32. Grafik perbandingan capaian iku tingkat kepatuhan pengelolaan data Lingkup KKP Tahun 2023	69
33. Schreen shoot Nilai Efisiensi Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2023 pada aplikasi SMART DJA	71
34. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2023	72

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan pada Perpres 18 Tahun 2020 dan Renstra Ditjen Perikanan Budi daya Tahun 2020- 2024. Hasil evaluasi kinerja tahun 2023 ini mempunyai makna strategis sebagai momentum perbaikan di tahun berikutnya untuk mencapai target akhir Renstra Ditjen Perikanan Budi Daya 2020-2024.

Perjanjian Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023 terdiri dari 6 Sasaran Strategis dan 23 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Perikanan Budi Daya Nomor. 71/DJPB/2023 tentang penetapan IKU Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023.

Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan periodik setiap tiga bulan (triwulanan). Pencapaian atas target indikator kinerja dihitung menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) setiap periodenya. Pada tahun 2023, terdapat penyesuaian Perjanjian Kinerja dengan adanya refocusing anggaran sebanyak dua kali diiringi dengan penyesuaian target Indikator kinerja utama. Hal tersebut dilakukan karena adanya pengurangan anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama serta adanya faktor-faktor eksternal dalam rangka menindaklanjuti arahan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola Ditjen Perikanan Budi Daya serta kondisi dinamika nasional antara lain peningkatan kegiatan budidaya dalam rangka mencapai visi pembangunan kelautan dan perikanan.

Capaian kinerja tahun 2023 secara keseluruhan termasuk berhasil, hal tersebut ditandai dengan pencapaian sasaran strategis tercapai secara maksimal yaitu sebesar 107,07%. Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya yang menyelenggarakan pembangunan perikanan Budi Daya yang berkelanjutan akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan perikanan budi daya yang berkelanjutan.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja 23 IKU terdapat 3 Iku yang tidak mencapai target yaitu : IKU (i) meningkatnya rata-rata pendapatan pembudidaya Ikan hanya mencapai 98,26% ; (ii) Produksi perikanan budidaya mencapai 84,60% dari target; dan (iii) Nilai IKPA Ditjen Perikanan Budi Daya yang mencapai 95,69% dari target .

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perikanan Budi Daya yang bertanggung jawab dan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dapat menjadi “obat mujarab atau *panacea*” bagi kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial dalam pembangunan nasional. Dari sisi ekonomi usaha pembudidayaan ikan sudah tumbuh menjadi mata pencaharian utama sebagian masyarakat, lapangan pekerjaan dan usaha serta investasi. Usaha pembudidayaan ikan sangat beragam, meliputi skala usaha (industri/pengusaha hingga skala rumah tangga dan mikro), teknologi yang diaplikasikan, segmentasi usaha serta komoditas dan wadah Budi Daya. Produksi yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan pasar ekspor. Sehingga berkontribusi pada sosial-ekonomi masyarakat, perekonomian daerah dan nasional dari penerimaan pajak dan devisa. Usaha pembudidayaan ikan sejalan dengan ekonomi kerakyatan, karena skala usaha dan teknologi dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk mengaplikasikan. Penelitian yang ada komoditas perikanan Budi Daya berupa rumput laut juga berfungsi sebagai penyerap dan simpanan karbon sehingga berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim serta kesehatan lingkungan karena menghasilkan oksigen.

Sumberdaya lahan perikanan Budi Daya yang ada dan belum sepenuhnya dimanfaatkan, sudah seharusnya dapat dijadikan modal dasar pembangunan daerah dan nasional. Untuk itu perlu perumusan strategi yang jitu, yang berpijak pada penelaahan mendalam mengenai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) terhadap setiap aspek yang mempengaruhi usaha perikanan Budi Daya, untuk terus dibangun dan dikembangkan, utamanya guna membangun daya saing dalam menghadapi era pasar global dan industrialisasi, serta tuntutan pengelolaan sumberdaya perikanan yang lebih bertanggung jawab. Untuk itu, pengembangan perikanan Budi Daya ke depan harus mampu mendayagunakan besarnya potensi sumberdaya lahan Budi Daya untuk dapat mendorong dan menghidupkan kegiatan produksi yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi rakyat, mendorong dan meningkatkan perolehan devisa negara dari aktivitas ekspor hasil perikanan Budi Daya, serta mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan.

Memperhatikan potensi, keragaan kondisi saat ini dan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan Budi Daya, maka sangat beralasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan 1 dari 5 program terobosan yang terkait dengan perikanan Budi Daya. Program terobosan KKP terkait perikanan Budi Daya tersebut adalah pengembangan perikanan Budi Daya di laut, pesisir dan darat (air tawar) yang berkelanjutan. Pada pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan (1) pengembangan perikanan Budi Daya yang berorientasi ekspor dan (2)

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Pembangunan perikanan Budi Daya tahun 2020-2024 perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017, perencanaan dan penganggaran nasional harus dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial berdasarkan prinsip *money follows program*. Berdasar pada isu dan permasalahan yang masih dihadapi, Ditjen Perikanan Budi Daya perlu me-reformulasi kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan Budi Daya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, bukan lagi semata pada peningkatan produksi saja.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan Budi Daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan Budi Daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam enam perspektif dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan Budi Daya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

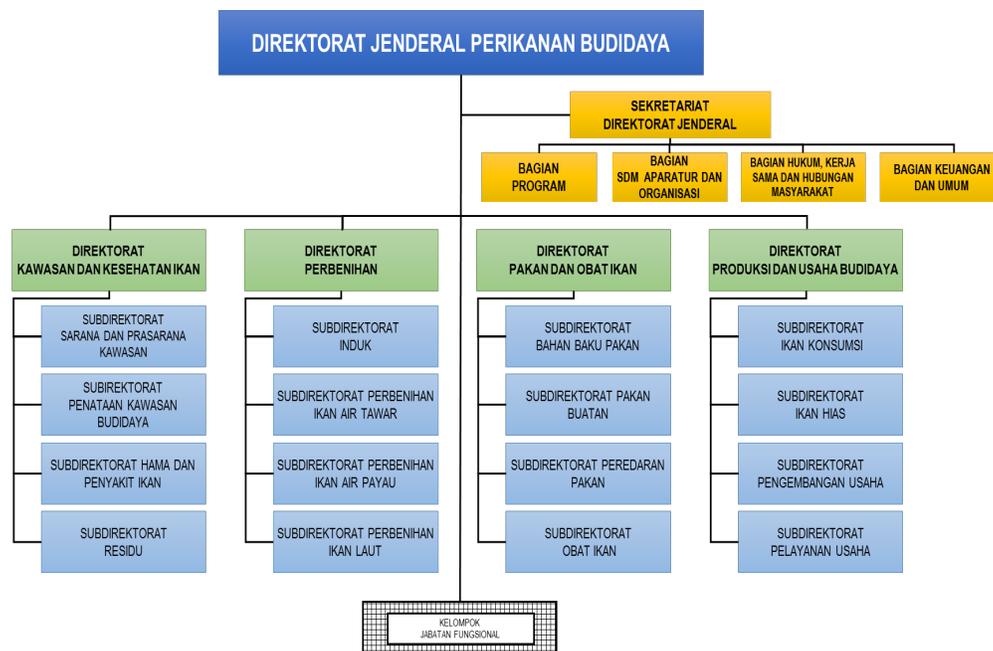
1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya selama Tahun 2023. Adapun tujuan penyusunan LKj ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi proses pencapaian kinerja dan sasaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tugas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan Budi Daya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: i) perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan Budi Daya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan Budi Daya, penerapan teknologi perikanan Budi Daya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha Budi Daya; ii) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan Budi Daya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan Budi Daya, penerapan teknologi perikanan Budi Daya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha Budi Daya; iii) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan Budi Daya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan Budi Daya, penerapan teknologi perikanan Budi Daya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha Budi Daya; iv) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan Budi Daya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan Budi Daya, penerapan teknologi perikanan Budi Daya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha Budi Daya; v) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan Budi Daya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan Budi Daya, penerapan teknologi perikanan Budi Daya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha Budi Daya; vi)

pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan vii) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Perikanan Budi Daya

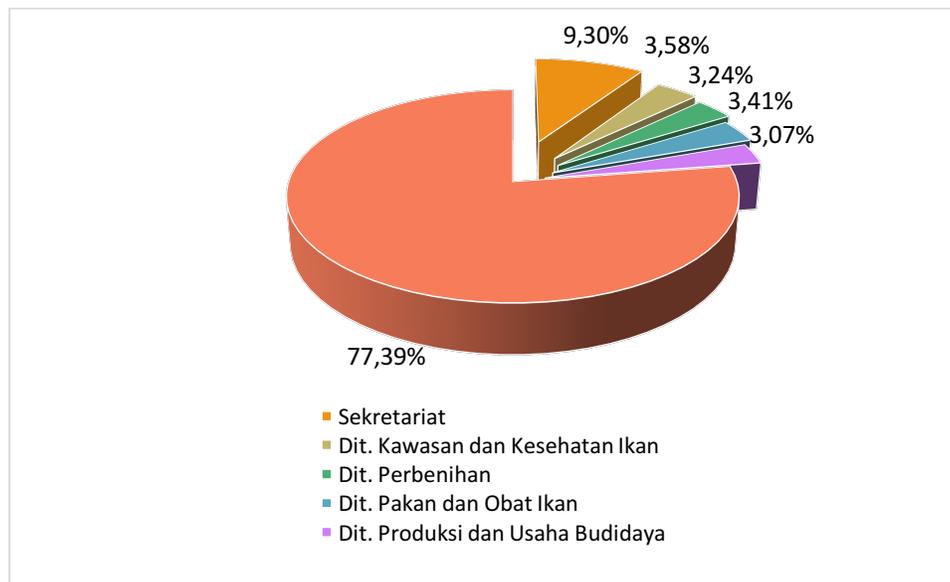
Selain itu Ditjen Perikanan Budi Daya juga mempunyai 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya meliputi:

1. Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar Sukabumi
2. Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau Jepara
3. Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung
4. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Mandingain
5. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu
6. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Sungai Gelam
7. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo
8. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar
9. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee
10. Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam
11. Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok
12. Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
13. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUUK) Karangasem

- 14. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang
- 15. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang

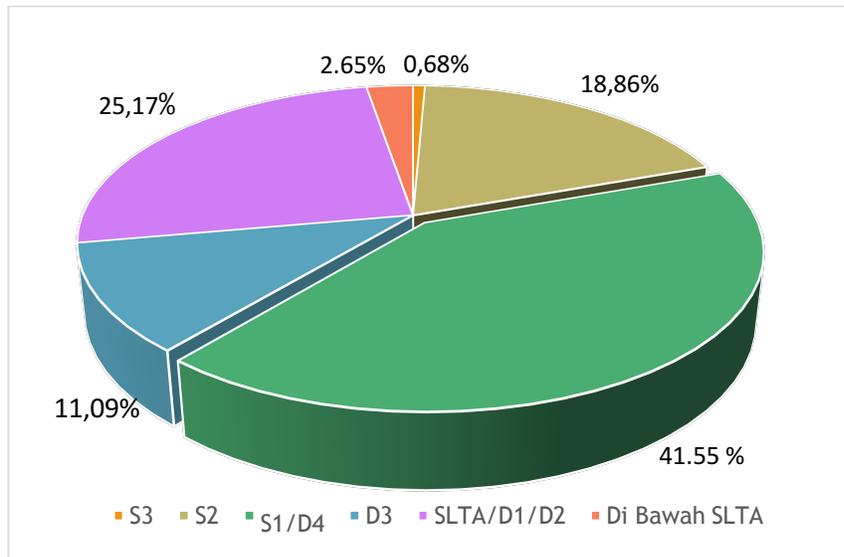
1.4. Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai DJPB (Pusat dan UPT) Triwulan IV Tahun 2023 adalah 1.172 orang. Pegawai DJPB tersebut tersebar pada 5 unit kerja eselon II dan 15 UPT dengan komposisi sebagai berikut : (i) Sekretariat sejumlah 109 orang (9,30%); (ii) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan sejumlah 42 orang (3,58%); (iii) Direktorat Perbenihan sejumlah 38 orang (3,24%); (iv) Direktorat Pakan dan Obat Ikan sejumlah 40 orang (3,41%) (v) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sejumlah 36 orang (3,07%); dan (vi) Unit Pelaksana Teknis sejumlah 907 orang (77,39%).



Gambar 2. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan Unit Kerja

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi SDM Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut: (i) S3 sejumlah 8 orang (0,68%); (ii) S2 sejumlah 221 orang (18,86%); (iii) S1/D4 sejumlah 487 orang (41,55%); (iv) D3 sejumlah 130 orang (11,09%); (v) SLTA/D1/D2 sejumlah 295 orang (25,17%); dan (vi) di bawah SLTA sejumlah 31 orang (2,65%).



Gambar 3. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan tingkat pendidikan

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

Potensi lahan perikanan Budi Daya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi Budi Daya air tawar 2,83 juta ha, Budi Daya air payau 2,96 juta ha dan Budi Daya laut 12,12 juta ha. Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 10,26 persen untuk Budi Daya air tawar, 22,48 persen pada Budi Daya air payau dan 1,39 persen untuk Budi Daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk Budi Daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan Budi Daya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan Budi Daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan Budi Daya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu permasalahan internal dan eksternal.

Permasalahan internal yang dihadapi meliputi : (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budi daya, (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan Budi Daya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vi) implementasi cara berBudi Daya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan Budi Daya; dan

(vii) kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan Budi Daya secara efisien.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan Budi Daya meliputi: (i) tidak adanya kepastian ruang untuk usaha perikanan Budi Daya, (ii) adanya asimetrik regulasi dan perizinan inter dan intra sektoral yang menghambat pengembangan usaha perikanan Budi Daya, (iii) adanya perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, dan (iv) belum adanya harmonisasi kebijakan, program dan anggaran antara pusat dan daerah serta inter dan intra sektoral.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj DJPB Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya selama kurun waktu 2023.
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tahun 2020 – 2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2023, penetapan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta pengukuran/pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja (IK) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta evaluasi dan analisis kinerja selama Tahun 2023. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Budi Daya

Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 2020-2024 sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden serta visi KKP yaitu “Terwujudnya masyarakat perikanan Budi Daya yang sejahtera dan sumber daya perikanan Budi Daya yang berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

Misi

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menjalankan Misi ke-2, yaitu “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan Budi Daya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional”. Misi utama DJPB di atas didukung dengan Misi ke-8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

Tujuan

Tujuan pembangunan perikanan Budi Daya adalah:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan Budi Daya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan Budi Daya;
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan Budi Daya secara berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan produksi perikanan Budi Daya secara berkelanjutan.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di DJPB, yakni meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi DJPB.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan Budi Daya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Ditjen Perikanan Budi Daya sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) DJPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan Budi Daya", dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 101 pada tahun 2020 dan 105 pada tahun 2024; dan
 - b. Pendapatan Pembudidaya sebesar Rp 3.450.000,- pada tahun 2020 dan Rp 3.700.000,- pada tahun 2024.
 2. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah "Ekonomi sektor perikanan Budi Daya meningkat" dengan Indikator Kinerja: Nilai Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 19,14 Miliar di tahun 2020 dan Rp 23,77 Miliar di tahun 2024.
 3. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah "Pengelolaan kawasan perikanan Budi Daya yang berkelanjutan" dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Budi Daya dengan target 4 pada tahun 2020 dan 5 pada tahun 2024;
 - b. Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budi Daya berkelanjutan dengan target 10 kawasan pada tahun 2020 dan 50 kawasan pada tahun 2024;
 - c. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /startegis lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dengan target 70 persen pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2024.
 4. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah "Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya", dengan Indikator Kinerja:
 - a. Produksi Perikanan Budi Daya sebesar 18,44 juta ton pada tahun 2020 dan 22,65 juta ton pada tahun 2024; dan
 - b. Produksi Ikan Hias sebesar 1,87 miliar ekor pada tahun 2020 dan 2,33 miliar ekor pada tahun 2024.
-

5. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan Budi Daya yang partisipatif”, dengan indikator pengujian residu produk perikanan Budi Daya yang partisipatif sebesar 13.630 paket pada tahun 2020 dan 30.730 paket pada tahun 2024; yang terdiri dari :
 - a. Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor bidang perbenihan 500 paket pada tahun 2020 dan 500 paket pada tahun 2024
 - b. Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan 10.000 paket pada tahun 2020 dan 26.000 paket pada tahun 2024
 - c. Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor bidang produksi dan usaha 3.000 paket pada tahun 2020 dan 4.000 paket pada tahun 2024
 - d. Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor bidang pakan dan obat ikan 130 paket pada tahun 2020 dan 230 paket pada tahun 2024
6. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya”, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai PM PRB DJB dengan nilai 34 di tahun 2020 dan 36 pada tahun 2024
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 72 di tahun 2020 dan 76 pada tahun 2024
 - c. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi sebesar 6 unit kerja pada tahun 2020 dan 10 unit kerja pada tahun 2024
 - d. Batas tertinggi prosentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dibandingkan nilai realisasi anggaran sebesar ≤ 1 pada tahun 2020 – 2024
 - e. Nilai PM SAKIP DJPB dengan nilai 85 pada tahun 2020 dan 86,75 pada tahun 2024
 - f. Tingkat Maturitas SPIP level 3 pada tahun 2020 – 2024
 - g. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya 60 persen pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2024
 - h. Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar 82 persen pada tahun 2020 dan 90 persen pada tahun 2024
 - i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik 1 unit pada tahun 2020 – 2024
 - j. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Budi Daya 88 pada tahun 2020 dan 90 pada tahun 2024
 - k. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dengan nilai 85 tahun 2020 dan 89 pada tahun 2024.

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pada Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2023 terdapat beberapa perbedaan target dengan target yang tercantum pada Renstra DJPB 2020-2024 hal ini terjadi karena adanya penyesuaian menindaklanjuti kebijakan KKP dan tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB 2021 . Adapun Target Indikator yang berbeda itu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Keselarasan target IKU Pada Renstra dan PK 2023

IK		RENSTRA	PK	PENJELASAN PERUBAHAN
SS.1. Meningkat				
IK-2	Rata-rata Pendapatan Pembudidaya	3.650.000	5.000.000	Adanya arahan dari pimpinan pada saat rapat para pimpinan Eselon 1 bersama MKP, Menteri Kelautan dan Perikanan meminta target Pendapatan pembudidaya menjadi 5 juta per bulan.
	Tingkat Kemandirian pulau pulau kecil terluar (lokasi)	4	0	Mulai Tahun 2022 sesuai dengan arahan dari pimpinan (MKP) untuk kegiatan kemandirian SKPT tidak di laksanakan lagi di DJPB
Ik-4	Tenaga Kerja yang terlibat	-	26.865	Arahan dari MKP yang meminta setiap Eselon 1 menghitung berapa tenaga kerja yang terlibat sebagai outcome dari program prioritas KKP.
1k-5	Korporasi pembudidaya ikan yang dikembangkan	-	10	IKU baru tahun 2023 dikarenakan adanya Taging kegiatan prioritas nasional.
Ik.7	Poduksi Perikanan Budi Daya (juta ton)		20,06	Hasil rapat pimpinan KKP, di sepakati target produksi perikanan Budi Daya turun menjadi 20,06 juta ton

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023

IK		RENSTRA	PK	PENJELASAN PERUBAHAN
IK-8	Produksi Ikan Hias (Milyar ekor)		1,64	Hasil rapat pimpinan KKP, di sepakati target produksi iakn hias diturunkan menjadi 1,64 milyar ekor,
SS.5		Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan Budi Daya yang partisipatif	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya	Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi sakis oleh Menpan tahun 2021 yang menyampaikan bahwa IKU pengujian residu dianggap bukan outcome tapi masih proses
IK-8	Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor (paket) Berubah menjadi Prosentase jumlah sampel residu yang memenuhi	17.885	-	
IK-9	Prosentase jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan (sample bebas residu) (%)	-	97	
IK.10	Nilai PM RB	33,5	-	PM PRB dihapuskan dilevel 1 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Setjen KKP Nomor 844/SJ.1/TU.140/X/2023 Tanggal 9 oktober 2023
IK.11	Indeks Profesionalitas ASN DJPB (%)	75	82	Capaian IP ASN tahun 2022 adalah 81. atas arahan setjen dimana jika taget indikator kinerja tahun berjalan sudah dicapai pada tahun sebelumnya maka dinaikkansaja targetnya, karena asumsinya tidak ada upaya pun sudah tercapai
IK-12	Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	9	13	Capaian Tahun 2022 Unit Kerja yang menerapkan wilayah bebas dari korupsi sudah mencapai 11, atas arahan setjen dimana jika taget indikator kinerja tahun berjalan sudah dicapai pada tahun sebelumnya maka dinaikkan saja

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023

IK	RENSTRA	PK	PENJELASAN PERUBAHAN	
			targetnya, karena asumsinya tidak ada upaya pun sudah tercapai	
IK-13	Batas tertinggi Persentase nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Ditjen Perikanan Budi Daya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2022	≤1	≤0,5	Penyesuaian target sebagaimana nota dinas Sekjen KKP Nomor 1072/SJ.1/RC.510/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal penyusunan dokumen Perencanaan kinerja Tahun 2023 lingkup KKP
IK-14	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM-SAKIP) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	86,50	80,50	adanya perubahan cara perhitungan, dari yang sebelumnya menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Evaluasi SAKIP sesuai Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, berubah menggunakan LKE sesuai Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021
IK-17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Ditjen Perikanan Budi Daya	86	92	Penyesuaian target sebagaimana nota dinas Sekjen KKP Nomor 1072/SJ.1/RC.510/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal penyusunan dokumen Perencanaan kinerja Tahun 2023 lingkup KKP
IK-18	Unit kerja yang menerapkan Inovasi pelayanan publik	1	-	Penyesuaian Nama IKU sebagaimana nota dinas Sekjen KKP Nomor 1072/SJ.1/RC.510/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal penyusunan dokumen Perencanaan kinerja Tahun 2023 lingkup KKP
IK-18	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya	-	75	
IK-19	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/strategis lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya(%)	77,5	77,5	Kesepakatan eselon 1 pada saat rapat kinerja KKP IKU ini yang awalnya masuk ke sasaran program Terkelolanya perikanan Budi Daya berkelanjutan menjadi ke Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
IK-20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	89	93,75	Perubahan target IKPA berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Setjen KKP Nomor 844/SJ.1/TU.140/X/2023 Tanggal 9 oktober 2023

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023

IK		RENSTRA	PK	PENJELASAN PERUBAHAN
IK.22	Indikator Tingkat Kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	-	77,5	penambahan IKU baru berdasarkan Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP Nomor 4.11/ITj.0/R.C.610/I/2021 tanggal 11 Januari Tahun 2021
IK.23	Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN.	-	77,5	
IK.24	Tingkat kepatuhan Pengelolaan Data	-	90	IKU baru sebagaimana nota dinas Sekjen KKP Nomor 1072/SJ.1/RC.510/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal penyusunan dokumen Perencanaan kinerja Tahun 2023 lingkup KKP.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tb. Haeru Rahayu
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya

Sakti Wahyu Trenggono

Tb. Haeru Rahayu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya	1.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (nilai)	104
		2.	Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya (Rp)	5.000.000
2.	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat	3.	Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perikanan budidaya (Rp. Miliar)	22,58
		4.	Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perikanan Budidaya (orang)	26.865
		5.	Korporasi pembudidaya ikan yang dikembangkan (Korporasi)	10
3.	Kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan	6.	Percontohan pengelolaan klaster Kawasan budidaya berkelanjutan (klaster)	40
4.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	7.	Produksi perikanan budidaya (Juta ton)	20,06
		8.	Produksi ikan hias (miliar ekor)	1,64
5.	Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya	9.	Persentase jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu) (%)	97
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	10.	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Nilai)	33,5
		11.	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (%)	81
		12.	Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) (Unit)	13
		13.	Batas tertinggi Persentase nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dibandingkan realisasi anggaran Direktorat jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2022 (%)	≤0,5

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	14. Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM-SAKIP) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Nilai)	80,5
	15. Tingkat Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Perikanan Budidaya (level)	3,1
	16. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (%)	75
	17. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Ditjen Perikanan Budidaya (%)	92
	18. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya (nilai)	75
	19. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (%)	77,5
	20. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Nilai)	89
	21. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Nilai)	86
	22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Nilai)	77,5
	23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Nilai)	77,5
	24. Tingkat kepatuhan Pengelolaan Data (%)	90

Data Anggaran

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	832.308.350.000
	Pengelolaan Perbenihan Ikan	189.960.124.000
	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	467.405.200.000
	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	122.042.500.000
	Pengelolaan Pakan dan Obat ikan	52.900.526.000
2.	Program Dukungan Manajemen	349.326.512.000
Total Anggaran Ditjen/Badan Tahun 2023		1.181.634.862.000

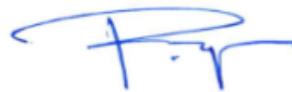
Jakarta, 06 Januari 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya



Tb. Haeru Rahayu

Gambar 4. Perjanjian Kinerja awal Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tb. Haeru Rahayu
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya

Sakti Wahyu Trenggono

Tb. Haeru Rahayu

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budi daya	1.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (nilai)	104
		2.	Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya (Rp)	5.000.000
2.	Ekonomi sektor perikanan budi daya meningkat	3.	Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perikanan budi daya (Rp. Miliar)	22,58
		4.	Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perikanan Budi Daya (orang)	26.865
		5.	Korporasi pembudidaya ikan yang dikembangkan (Korporasi)	10
3.	Kawasan perikanan budi daya yang berkelanjutan	6.	Percontohan pengelolaan klaster Kawasan budi daya berkelanjutan (klaster)	40
4.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya	7.	Produksi perikanan budi daya (Juta ton)	20,06
		8.	Produksi ikan hias (miliar ekor)	1,64
5.	Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya	9.	Persentase jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu) (%)	97
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	10.	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (%)	81
		11.	Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) (Unit)	13
		12.	Batas tertinggi Persentase nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dibandingkan realisasi anggaran Direktorat jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2022 (%)	≤0,5
		13.	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM-SAKIP) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	80,5
		14.	Tingkat Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	3,1

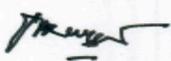
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Pemerintah (SPIP) Ditjen Perikanan Budi Daya (level)	
	15. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (%)	75
	16. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Ditjen Perikanan Budi Daya (%)	92
	17. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya (nilai)	75
	18. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (%)	77,5
	19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	93,75
	20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	86
	21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	77,5
	22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	77,5
	23. Tingkat kepatuhan Pengelolaan Data (%)	90

Data Anggaran

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	766.387.993.000
	Pengelolaan Perbenihan Ikan	157.005.747.000
	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	383.541.059.000
	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	185.817.246.000
	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	40.023.941.000
2.	Program Dukungan Manajemen	333.778.042.000
Total Anggaran Ditjen/Badan Tahun 2023		1.100.166.035.000

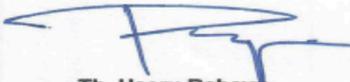
Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan
Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

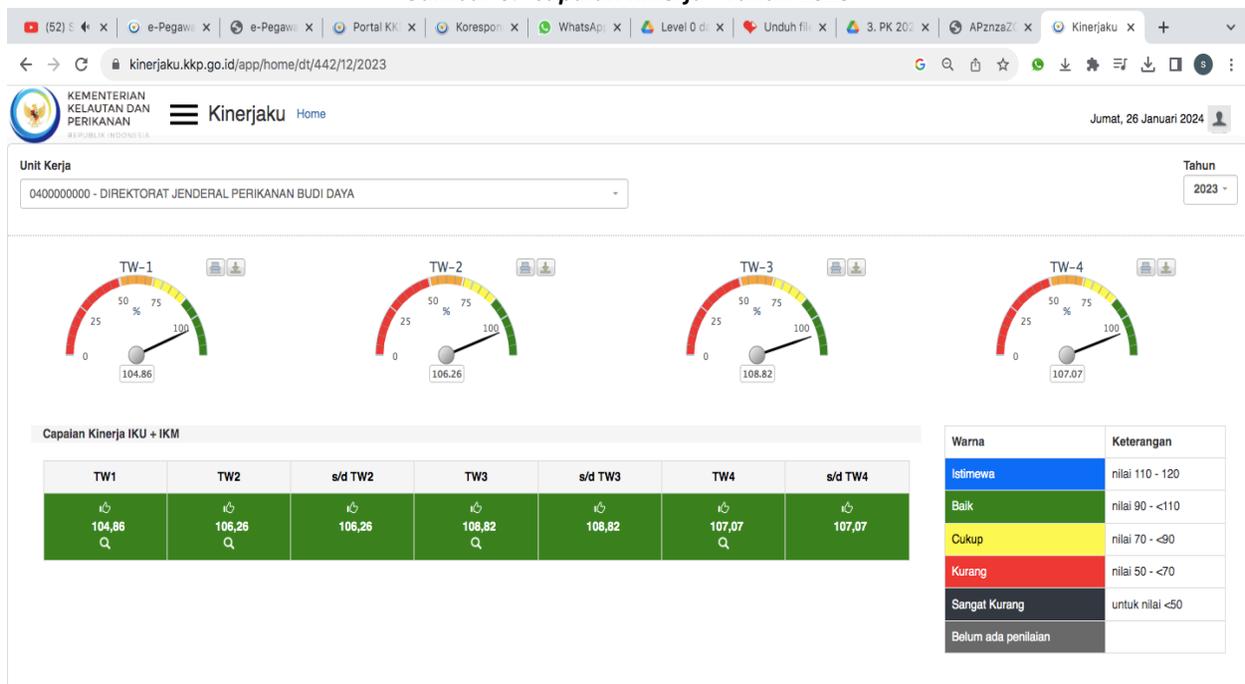
Gambar 5. PK Revisi November 2023

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implemmentasi Aplikasi "Kinerjaku", berikut capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023

Gambar 6. Capaian Kinerja Tahun 2023



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan Budi Daya pada tahun 2023 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya menitikberatkan pada enam Sasaran Strategis dengan dua puluh empat Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budi Daya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon I.

Capaian Kinerja Ditjen perikanan Budidaya Tahun 2023 sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 107,07 %. Capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan NPSS tahun 2022 yang besarnya mencapai 106,14%. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pencapaian sasaran.

Capaian Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2023 tergambar pada Dashboard aplikasi Kinerjaku di bawah ini.

Tabel 2. Capaian Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2023

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	% Aplikasi Kinerja
SS.1	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budi Daya				
1	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	104,00	104,83	100,80	100,80
2	Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya (Rp)	5.000.000	4.912.815	98,26	98,26
SS.2	Ekonomo Sektora Perikanan Budi Daya Meningkat				
3	Nilai PNBP dari perikanan budidaya (Rp. Miliar)	22,58	43,26	191,58	120
4	Tenaga kerja terlibat	26.865	45.892	170,82	120
5	Korporasi pembudidaya ikan yang dikembangkan	10	10	100	100
SS.3	Kawasan Perikanan Budi Daya Yang berkelanjutan				
6	Percontohan Pengelolaan cluster kawasan budidaya berkelanjutan	40	50	125	120
SS.4	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya				
7	produksi Perikanan Budidaya (juta ton)	20,06	16,97	84,60	84,60
8	produksi ikan hias (miliar ekor)	1,64	1,73	105,49	105,49
SS.5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya				
9	Prosentase jumlah sampe residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu) (%)	97	100	103,09	103,09
SS.6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
10	Indeks profesionalitas ASN DJPB (%)	81	88,37	109,10	109,10
11	Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	13	13	100	100
12	Batas tertinggi Prosentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen perikanan Budidaya	≤0,5	0,38	190	120

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%	% Aplikasi Kinerjau
	dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022 (%)				
13	Nilai PM SAKIP DJPB (nilai)	80,50	80,83	100,41	100,41
14	Tingkat Maturitas SPIP (Level)	3,1	3,61	116,45	116,45
15	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	75	95,48	127,31	120
16	Persentase unit kerja lingkup DJPB yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92	115,83	125,90	120
17	Nilai Hasil proposal Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya	75	85,88	114,51	114,51
18	Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/startegis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	77,5	80,91	104,40	104,40
19	Nilai IKPA DJPB	93,75	89,71	95,69	95,69
20	Nilai Kinerja Anggaran DJPB	86	89,77	104,38	104,38
21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang dan Jasa	77,50	82,28	106,17	106,17
22	Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN	77,5	93,00	120	120
23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data	90	99,47	110,52	110,52

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Secara rinci analisis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

SS.1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budi Daya

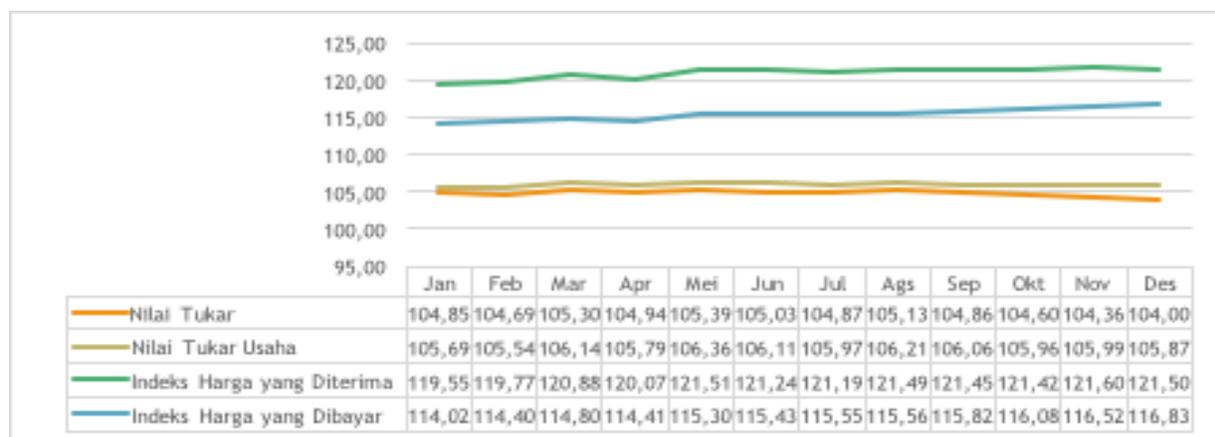
IKU.1 Nilai Tukar pembudidaya ikan (NTPi)

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
100,98	100,55	102,83	104,62	104	104,83	100,80	105	99,64

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah salah satu indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang digunakan untuk mengukur daya tukar hasil usaha budidaya dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan biaya usaha budidayanya. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan angka indek antara indeks harga yang diterima oleh pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan (Ib). Nilai tukar lebih besar dari 100 berarti pembudidaya mengalami surplus kenaikan harga produksi lebih tinggi dibanding kenaikan harga konsumsi, nilai tukar sama dengan 100 berarti pembudidaya mengalami imas kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi dan nilai tukar lebih kecil dari

100 berarti pembudidaya mengalami defisit kenaikan harga produksi lebih kecil daripada kenaikan harga konsumsi.

Jika dilihat perkembangan selama kurun waktu 2020 – 2023 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) mengalami kenaikan sebesar 1,40 persen per tahun sedangkan Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPI) mengalami kenaikan sebesar 1,64 persen per tahun. Naiknya nilai tukar ini disebabkan naiknya indeks diterima oleh pembudidaya ikan setiap tahunnya sehingga nilai tukar usaha terus naik setiap tahunnya.



Gambar 7. Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Bulan Januari - Desember Tahun 2023

Selama tahun 2023 pada bulan Januari - Desember tahun 2023 secara rata-rata Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) sebesar 104,83. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tahun 2023 berada di atas 100. Pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Nilai Tukar Pembudidaya Ikan sejak bulan September mengalami penurunan sampai bulan Desember. Penurunan ini disebabkan karena naiknya indeks harga yang dibayar dan menurunnya harga rumput laut.

Tabel 3. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Januari - Desember Tahun 2023

Komponen NTPI	Bulan												Rata-rata
	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
Nilai Tukar	104,85	104,69	105,30	104,94	105,39	105,03	104,87	105,13	104,86	104,60	104,36	104,00	104,83
Nilai Tukar Usaha	105,69	105,54	106,14	105,79	106,36	106,11	105,97	106,21	106,06	105,96	105,99	105,87	105,97
a Indeks Harga Diterima (It)	119,55	119,77	120,88	120,07	121,51	121,24	121,19	121,49	121,45	121,42	121,60	121,50	120,97
- Budidaya air tawar	113,34	113,01	113,53	113,29	114,66	114,88	115,17	114,70	114,44	114,47	114,34	115,09	114,24
- Budidaya laut	120,87	120,81	121,08	120,92	119,64	118,20	117,60	116,78	116,79	115,57	115,75	115,34	118,28
- Budidaya Air Payau	118,38	118,89	120,48	119,25	121,14	121,19	121,30	122,27	123,01	123,47	123,62	123,50	121,37
b Indeks harga Dibayar	114,02	114,40	114,80	114,41	115,30	115,43	115,55	115,56	115,82	116,08	116,52	116,83	115,39
- Indeks KRT	115,05	115,43	115,77	115,42	116,42	116,69	116,82	116,79	117,19	117,62	118,45	119,05	116,73
- Indeks BPPBM	113,12	113,48	113,88	113,49	114,24	114,25	114,36	114,39	114,52	114,60	114,73	114,76	114,15

Jika dilihat dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa selama tahun 2023 indeks harga diterima (It) mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,15 persen dengan rata-rata indeks harga diterima (It) sebesar 120,97. Dari komponen penyusun It, dapat dilihat pada tabel di atas bahwa indeks harga ikan air laut mengalami penurunan harga dengan penurunan rata-rata sebesar 0,42 persen. Sementara indeks harga ikan air tawar mengalami kenaikan dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,14 persen per bulan dan 0,39 persen per bulan. Meningkatnya indeks harga budidaya tawar dan budidaya air payau dimungkinkan semakin membaiknya tingkat permintaan ikan tawar dan payau.

Komponen penyusun Ib yang terdiri dari indeks konsumsi rumah tangga (KRT) dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM), masing-masing indeks rata-rata selama tahun 2023 sebesar 116,73 dan 114,15 dengan kenaikan rata-rata masing-masing sebesar 0,31 persen per bulan dan 0,13 persen per bulan. Naiknya indeks harga dibayarkan oleh pembudidaya ini diakibatkan oleh adanya desakan inflasi.

Tabel 4 Indeks Konsumsi Rumah Tangga Januari - Desember Tahun 2023

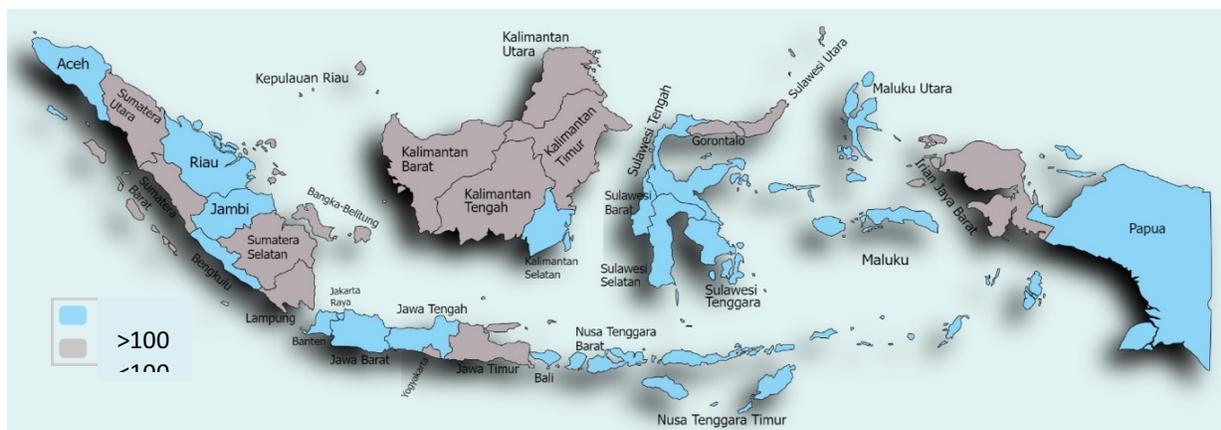
Komponen NTPi	Bulan												Rata-rata	Kenaikan Rata-rata (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des		
Konsumsi Rumah Tangga	115,05	115,43	115,77	115,42	116,42	116,69	116,82	116,79	117,19	117,62	118,45	119,05	116,73	0,31
1 Makanan, Minuman Dan Tembakau	116,95	117,50	117,97	117,47	118,87	119,38	119,52	119,36	119,94	120,54	122,02	123,00	119,38	0,46
2 Pakaian Dan Alas Kaki	116,89	117,10	117,37	117,12	118,86	118,95	119,21	119,31	119,43	119,50	119,63	119,77	118,60	0,22
3 Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	107,46	107,59	107,70	107,58	107,82	107,88	107,95	108,07	108,10	108,16	108,22	108,29	107,90	0,07
4 Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	114,37	114,70	114,91	114,66	115,24	115,37	115,48	115,58	115,76	115,86	116,02	116,19	115,34	0,14
5 Kesehatan	113,14	113,39	113,55	113,36	113,82	113,87	113,95	114,09	114,24	114,40	114,52	114,80	113,93	0,13
6 Transportasi	117,63	117,84	118,04	117,84	118,21	117,80	117,91	117,99	118,49	119,05	118,88	118,89	118,21	0,10
7 Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	104,38	104,41	104,40	104,40	104,39	104,40	104,39	104,39	104,39	104,40	104,39	104,50	104,40	0,01
8 Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	112,24	112,39	112,49	112,37	112,74	112,91	113,51	113,84	113,96	114,03	114,15	114,28	113,24	0,16
9 Pendidikan	104,03	104,04	104,04	104,04	104,04	104,04	104,25	104,49	104,52	104,53	104,53	104,53	104,26	0,04
10 Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	111,63	111,84	112,02	111,83	112,34	112,49	112,62	112,77	112,85	112,95	113,17	113,31	112,49	0,14
11 Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	116,61	116,87	117,12	116,87	117,77	117,93	118,09	118,21	118,36	118,56	118,91	119,26	117,88	0,21

Selama periode Januari - Desember indeks konsumsi rumah tangga tertinggi secara rata-rata adalah Makanan, Minuman dan Tembakau (119,38), Pakaian dan Alas Kaki (118,60) serta Transportasi (118,21). Tingginya kenaikan ketiga komponen ini dikarenakan adanya kenaikan harga pada kebutuhan pokok yang menyebabkan inflasi harga sehingga memicu naiknya harga-harga komponen lainnya.

Tabel 5. Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Januari - Desember Tahun 2023

Komponen NTPi	Indeks Harga												Rata-rata	Kenaikan Rata-rata (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des		
BPPBM	113,12	113,48	113,88	113,49	114,24	114,25	114,36	114,39	114,52	114,60	114,73	114,76	114,15	0,13
1 Bibit/Benih	113,72	114,28	114,90	114,30	115,41	115,07	114,97	114,94	115,09	115,14	115,34	115,11	114,85	0,11
2 Pupuk, Obat-Obatan, Dan Pakan Ikan	115,19	115,65	116,09	115,64	116,56	116,65	116,91	116,96	117,05	117,16	117,31	117,43	116,55	0,18
3 Sewa Dan Pengeluaran Lainnya	104,37	104,40	104,48	104,42	104,54	104,55	104,60	104,62	104,62	104,62	104,63	104,69	104,54	0,03
4 Transportasi Dan Komunikasi	120,56	120,94	121,04	120,85	121,17	120,87	120,89	120,97	121,40	121,77	121,66	121,64	121,15	0,08
5 Barang Modal	107,33	107,38	107,45	107,39	107,53	107,60	107,63	107,68	107,70	107,74	107,75	107,82	107,58	0,04
6 Upah Buruh	110,40	110,68	110,76	110,61	110,96	111,12	111,42	111,46	111,85	111,85	111,92	112,05	111,26	0,14

Berdasarkan komponennya selama periode Januari – Desember, Indeks BPPBM yang tertinggi berturut-turut adalah Transportasi dan Komunikasi, pupuk, obat-obatan dan pakan ikan, dan benih/bibit, dengan kenaikan rata-rata per bulan masing-masing sebesar 0,08 persen, 0,18 persen dan 0,11 persen. Naiknya ketiga komponen ini selain disebabkan kenaikan inflasi, juga dimungkinkan karena masih tingginya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang memengaruhi harga tepung ikan dan secara langsung mempengaruhi harga pakan ikan, sementara bibit/benih mengalami kenaikan dimungkinkan karena naiknya harga benih.



Gambar 8. Peta Nilai Tukar Pembudidaya Ikan bulan Januari - Desember Tahun 2023

Berdasarkan wilayahnya selama periode Januari – Desember tahun 2023 terdapat 19 provinsi yang rata-rata indeks NTPi-nya di atas 100, yaitu Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua. NTPi rata-rata tertinggi pada Januari - September ini adalah provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai sebesar 115,06 dan NTPi terendah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 89,58.

Dalam kondisi saat ini yang dapat dilakukan guna menjaga indeks NTPI dan NTUPI adalah menjaga produktivitas pembudidaya sekaligus menjaga harga komoditas di tingkat pembudidaya tidak turun atau bahkan bisa naik dan menekan biaya yang dikeluarkan oleh pembudidaya. Bibit/benih dan pakan adalah dua komponen ini yang cukup berpengaruh dan dapat diintervensi oleh Ditjen Perikanan Budidaya. Oleh karenanya kebijakan terkait bibit/benih dan pakan dapat dilakukan guna menjaga keberlangsungan usaha pembudidaya. Selain itu, sistem pendistribusian hasil produksi baik benih maupun ikan konsumsi juga mesti diperhatikan saat ini karena saat ini sistem transportasi menjadi kendala dengan kondisi saat ini.

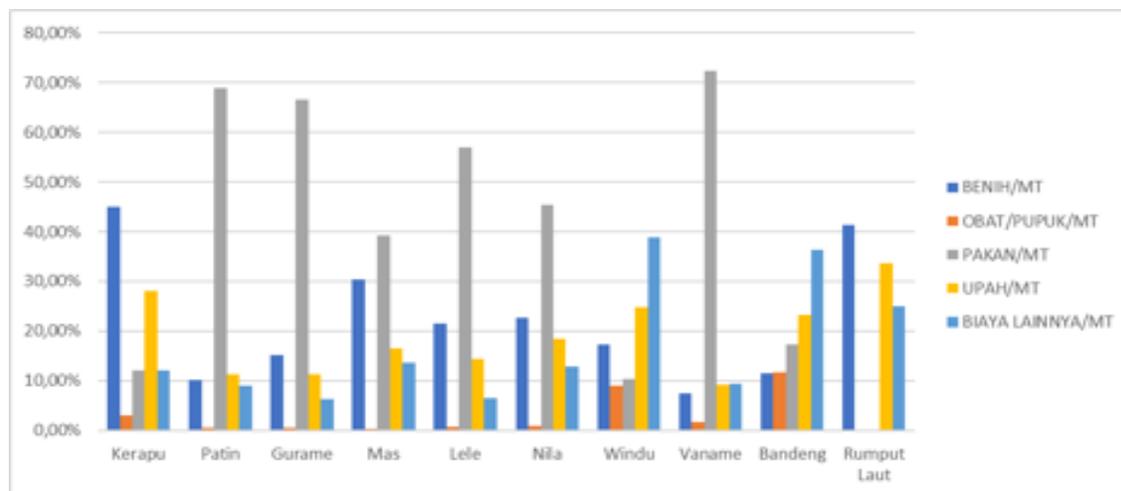
IKU.2 . Rata-rata Pendapatan Pembudidaya

2019	Realisasi			2023			Renstra 2020-2024	
	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
3.298.751	3.544.245	4.327.158	4.842.187	5.000.000	4.912.815	98,6	4.800.000	102,35

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional, pendapatan atau *income* adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun, sementara itu terkait dengan pendapatan pembudidaya adalah uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan membudidayakan ikan, sehingga bisa diukur seberapa jauh kegiatan pembudidayaan ikan dapat memberikan kehidupan yang layak bagi pembudidaya.

Peningkatan pendapatan pembudidaya merupakan merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan perikanan budidaya oleh karena itu rencana aksi yang dilakukan dalam setiap pencapaian IKU secara tidak langsung juga merupakan rencana aksi dalam rangka meningkatkan pendapatan pembudidaya. Pendapatan pembudidaya ikan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga ikan, termasuk rumput laut, harga rumput laut kering, dibandingkan dengan tahun 2022 pendapatan pembudidaya mengalami peningkatan sebesar 1,46%, peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan harga beberapa komoditas perikanan budidaya seperti kakap, rumput laut, nila dan lele yang banyak dikonsumsi dalam negeri, harga ikan merupakan indikator yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, harga ikan untuk beberapa jenis ikan diindikasikan dapat menyebabkan inflasi untuk ikan hasil budidaya, ikan bandeng merupakan salah satu ikan yang harganya dapat menyebabkan inflasi menurut BPS. Harga ikan dipengaruhi oleh banyak hal, seperti musim, waktu panen, harga sarana produksi pembudidayaan ikan dan preferensi konsumsi masyarakat, oleh karena itu banyak cara yang bisa dilakukan untuk menstabilkan harga ikan di masyarakat, tidak terbatas hanya pada bantuan

pemerintah saja tapi bisa juga dengan berbagai penguatan kelembagaan ataupun dengan promosi yang terus menerus.



Gambar 9. Struktur Biaya Operasional Pembudidaya Ikan Beberapa Komoditas Utama

Secara garis besar dari grafik diatas biaya yang paling banyak digunakan sebagai biaya input pembudidayaan ikan adalah pakan rata-rata diatas 60 % kecuali untuk ikan kerapu dan udang windu, biaya pakan untuk ikan kerapu cenderung kecil karena pembudidaya kerapu masih bergantung pada ikan rucah sebagai pakan ikan kerapu sedangkan untuk ikan untuk udang windu yang rata-rata cara budidayanya masih tradisional, secara umum kondisi persentase penggunaan biaya operasional untk budidaya ikan masih sama dengan triwulan 2 tahun 2023.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan pembudidaya Ditjen Perikanan Budidaya mengadakan program bantuan pemerintah untuk meningkatkan usaha pembudidaya sehingga pendapatan meningkat.

SS.2. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat

IKU. 3 Nilai PNBP dari Perikanan Budi Daya

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
19,83	23,50	24,34	29,31	22,58	43,26	191,49	49,98	89,54

*Satuan milyar rupiah

Realisasi PNBP yang berasal dari DJPB s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp43.258.107.475,- atau 191,49% dari target sebesar Rp22.589.806.000,- dimana realisasi PNBP mengalami kenaikan

sebesar 48,57% atau sebesar Rp13.945.406.405,31,- dibanding realisasi tahun 2022 pada periode yang sama sebesar Rp29.312.701.070,- hal ini dikarenakan :

1. Pada bulan Mei 2023 terdapat setoran PNBP hasil panen parsial udang vaname Kebumen dan ukuran konsumsi sudah mencapai ukuran siap dijual.
2. Adanya peningkatan permintaan pakan mandiri, baik yang pakan jenis tenggelam maupun yang apung, dan bersamaan dengan penjualan ikan patin konsumsi.
3. Telah ditetapkannya 3 Satuan Kerja pada DJPB menjadi satuan kerja BLU, melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Penetapan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada tanggal 10 Mei 2023.

PNBP lainnya berupa jenis PNBP pelayanan meliputi:

1. hasil samping kegiatan pembudidayaan ikan
2. pemeriksaan/pengujian laboratorium
3. pekerjaan dan informasi
4. hasil penjualan hasil produksi non litbang lainnya
5. penggunaan sarana prasarana sesuai tugas dan fungsi
6. jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 85 Tahun 2021

Rincian realisasi PNBP Pelayanan s.d. 31 Desember 2023 didominasi penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya (425112) sebesar Rp16.125.856.127,-, atau 116,44% dari target Rp13.848.509.000,- namun mengalami penurunan dibanding realisasi tahun 2022 pada periode yang sama sebesar Rp 25.819.386.982,- hal ini dikarenakan:

1. Sebagian dari pendapatan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya (425112) masuk dalam pendapatan BLU DJPB
 2. Dikarenakan adanya kegiatan pemeliharaan budidaya vaname tahun 2021 yang lewat tahun melalui kegiatan milenial yang dimulai pada akhir semester kedua dengan pemeliharaan sekitar 4-5 bulan sehingga setoran PNBP dilakukan pada tahun 2022 setelah panen, sedangkan pada tahun 2022 kegiatan selesai akhir tahun tidak ada yang lewat tahun 2023, sehingga kondisi tahun 2023 tidak sama seperti 2022.
 3. Menurunnya permintaan benih khususnya untuk ekspor.
 4. Belum ada pasar untuk komoditas Abalone yang mau menampung produk benih maupun Abalone konsumsi yang dihasilkan.
 5. Komoditas tiram mutiara, pada awal tahun 2023 ukuran tiram mutiara masih berukuran 3-6 cm dan belum bisa dilakukan penjualan. Berdasarkan pengamatan pertumbuhan tiram
-

mutiara di perairan Sekotong terbilang lambat, diprediksi pada bulan Juli 2023, mulai akan dilakukan penjualan tiram mutiara karena sudah mencapai ukuran rata-rata 7 cm.

6. Terdapat kerusakan fasilitas sarana hatchery dikarenakan umur pemakaian yang belum ada perbaikan, kondisi ini mengakibatkan belum optimalnya proses pemeliharaan produksi benih.
7. Produksi benih yang dihasilkan saat ini difokuskan pada program pemerintah atas bantuan benih sehingga distribusi kepada pembudidaya dan disesuaikan dengan pasar benih yang masih belum tinggi permintaannya karena belum musim tebar benih ikan laut.
8. Pada beberapa jenis ikan menjadi tidak produktif saat terjadinya musim kemarau dikarenakan induk yang diproduksi tidak matang gonad (kematangan telur pada induk betina ikan).

Pendapatan Badan Layanan Umum pada DJPB sebesar Rp13.629.094.429,- atau telah mencapai 155,92% dari target Rp8.741.297.000,-. Layanan BLU DJPB dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. BLU Situbondo memiliki layanan utama yang menjadi unggulan berupa Layanan Benih dan Induk Unggul; Layanan Laboratorium; Layanan Bimbingan Teknis dan Kerjasama; Layanan Produksi Ikan Konsumsi (hasil samping bimtek dan produksi calin); dan Layanan Produksi Pakan Mandiri. Sebagai pendukung kegiatan layanan utama terdapat beberapa layanan penunjang diantaranya sewa penggunaan sarana dan prasarana (Auditorium, Ruang Rapat, Asrama, Guest House) dan sewa kendaraan atau transportasi (Minibus, Pickup, Bus, Truck, Katamaran).
2. BLU Jepara memiliki layanan utama produksi benih dan induk unggul, pelayanan pakan, pelayanan laboratorium, dan pelayanan bimbingan teknis.
3. BLU Karawang memiliki layanan produksi benih dan induk unggul, pelayanan produk perikanan konsumsi, pelayanan laboratorium, dan pelayanan bimbingan teknis.

PNBP lainnya berupa pengelolaan BMN berupa pendapatan dari Penjualan tanah, gedung dan bangunan (425121), pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin (425122) berupa lelang kendaraan dan ATK, sewa rumah dinas, pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan atas sewa lahan tambak, sewa tanah dan bangunan untuk *coldstorage*, pendapatan penjualan peralatan dan mesin serta pendapatan dari pemindahantanganan BMN lainnya (425129). Semetara Penerimaan non anggaran (hak negara lainnya) s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp5.418.497.463,-.

Permasalahan muncul setelah 3 UPT lingkup DJPB yang semula mengelola anggaran yang bersumber dari PNBP berubah menjadi satker dengan pengelolaan anggaran BLU, yang mana masih terdapat beberapa masalah terkait dengan pengesahan pendapatan dan belanja.

Rencana aksi ke depan merubah akun pendapatan PNBPN menjadi akun BLU dan melakukan pengesahan setiap akhir bulan.

Anggaran untuk pengelolaan PNBPN sebesar Rp129.800.000 untuk kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja PNBPN DJPB KKP dan sudah terealisasi sebesar Rp129.800.000 atau sebesar 100% untuk kegiatan perjalanan dinas.

IKU.4 Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perikanan Budi Daya

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	45.813	26.865	45.892	170,82	23.784	192,95

*Iku Baru Tahun 2022

Indikator Kinerja Jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan baik tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Indikator Tenaga kerja yang terlibat ini secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan. Kegiatan sektor KP terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran, usaha garam, penyuluhan, dan karantina ikan. Khususnya Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada perikanan budidaya yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan. Sektor perikanan budidaya merupakan sektor yang melibatkan banyak keterlibatan dan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan peningkatan sektor perikanan budidaya sebanding dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Adapun penyerapan tenaga kerja di perikanan budidaya meliputi kegiatan Pengelolaan Pembenihan Ikan, Pengelolaan pakan dan Obat Ikan, pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan, dan Pengelolaan produksi dan obat ikan.

Adapun perhitungan Indikator ini dengan formula tenaga kerja yang terlibat adalah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung dengan Realisasi tenaga kerja di tahun 2022 sebesar 45.892 .orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Tenaga Kerja Terlibat Bidang Perikanan Budidaya

No	Bidang	Jumlah Tenaga Kerja	Keterangan
1.	Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan	3.202	Tenaga kerja dihitung dari tenaga kerja yang terserap baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan bantuan pemerintah
2.	Bidang Pakan dan Obat Ikan	2.660	
3.	Bidang Perbenihan	22.720	
4.	Bidang Produksi dan Usaha	17.310	
	Jumlah	45.892	

Upaya kedepan yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya antara lain (1) peningkatan percepatan pelaksanaan kegiatan lingkup DJPB sehingga penyerapan tenaga kerja semakin meningkat; (2) berkoordinasi dengan K/L terkait dengan penyerapan

tenaga kerja sektor perikanan budidaya ; (3) optimalisasi UPT lingkup DJPB dalam pelaksanaan ketenaga kerjaan.

IKU.5. Korporasi Pembudaya Ikan yang Dikembangkan

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	10	10	100	15	66,67

*iku Baru tahun 2023

Usaha Budi Daya perikanan merupakan salah satu usaha subsektor yang diharapkan dalam mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Budi Daya perikanan berkontribusi terhadap kesejahteraan pembudidaya ikan dalam menjamin ketersediaan pangan rumah tangga, gizi dan kesehatan, penyedia lapangan pekerjaan dan pendapatan di pedesaan. Kondisi empiris menunjukkan karakteristik Budi Daya perikanan di Indonesia didominasi oleh pembudidaya berskala usaha kecil, menerapkan teknologi konvensional, sulit meningkatkan produktivitasnya karena aksesibilitas rendah terhadap modal, teknologi, informasi dan pasar, serta rendahnya kapasitas.

Sesuai dengan arahan presiden terkait dengan peningkatan usaha petani dan nelayan termasuk pembudidaya ikan dalam mendorong terjadinya peningkatan skala ekonomi kecil untuk bergabung dan berkolaborasi melalui kelompok atau korporasi besar. Dengan demikian, diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan skala ekonomi yang besar pula. Bentuk peningkatan usaha petani dan nelayan tersebut melalui Korporasi.

Korporasi Pembudidaya Ikan adalah suatu kegiatan usaha (agribisnis) yang meliputi usaha hulu hingga hilir yang dijalankan bersama oleh pembudidaya ikan dalam bentuk usaha ekonomi yang berbadan hukum dimana sebagian besar kepemilikan modal dimiliki pembudidaya ikan. Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan termasuk Pembudidaya Ikan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan tertuang dalam Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yaitu Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Pelaksanaan korporasi dilakukan melalui implementasi program kegiatan yang terbagi ke 8 (delapan) pilar yaitu: yaitu: (1) penerapan corporate farming; (2) konsolidasi kelembagaan; (3) adaptasi inovasi teknologi; (4) sinergi; (5) kemudahan akses pembiayaan, (6) pelibatan off taker; (7) digitalisasi/penerapan IT dan (8) dukungan logistik.

Target IKU Pembudidaya Ikan yang berkembang adalah 10 (sepuluh) kelembagaan dengan realisasi 10 kelembagaan (100%). Rincian korporsi pembudidaya ikan tahun 2024 sebagai berikut:

- 1. Koperasi Bertuah Samudera Langkat.** Koperasi Pemasaran Serba Usaha Bertuah Samudra Langkat merupakan koperasi yang bergerak pada sektor usaha kelautan dan perikanan dibidang usaha Budidaya udang vaname dan kepiting soka, penyediaan benih udang, pakan udang, obat-obatan dan berperan sebagai off-taker hasil panen anggota Koperasi. Koperasi ini beralamatkan di Jl. Pringgatan Nomor 31, Linkungan VII, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
 - 2. Koperasi Marine Agri Sejahtera.** Koperasi ini bergerak di usaha budidaya ikan laut, khususnya komoditas Bawal Bintang dan Kerapu, koperasi ini bekerjasama dengan kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) Usaha Maju, Usaha Maju Bersama, Tanjung Mas dan Mansyur Syah yang berlokasi di Kampung Keter Tengah, Desa Tembeling Tanjung, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau. Koperasi bergerak dibidang penyediaan sarana dan prasarana karamba jarring apung, pakan dan benih ikan laut selanjutnya Koperasi juga berperan sebagai off-taker dan eksportir hasil panen para anggota Koperasi dan Kelompok Pembudidaya Ikan.
 - 3. Koperasi Gapoktan Jasa Sinar Mas.** Koperasi ini bergerak di bidang pengembangan budidaya ikan air tawar terutama ikan Nila dengan menyediakan pakan ikan bagi anggota maupun bukan anggota koperasi, fasilitasi sarana dan prasarana usaha produksi, pemasaran serta pengolahan serta pendistribusian ikan untuk memenuhi permintaan pasar baik dalam maupun diluar wilayah Kabupaten Pringsewu, Koperasi ini terletak di Jl. Pasir Ukir, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.
 - 4. Koperasi Nila Wanajaya Sejahtera.** Desa Wanantara menjadi Desa unggulan dalam produksi budidaya ikan nila, dimana saat ini telah terbentuk Koperasi Nila Wanajasa Sejahtera, usaha utama dari Koperasi ini adalah penyediaan pakan dan benih ikan serta berperan sebagai off-taker hasil panen budidaya ikan nila.
 - 5. Koperasi Mino Mulyo Abadi.** Koperasi Mino Mulyo Abadi berlokasi di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, potensi pengembangan budidaya di Kecamatan Tayu ini adalah komoditas budidaya ikan Nila Salin yang juga di usahakan secara polikultur dengan komoditas udang vaname.
 - 6. Koperasi Anugerah Mina Sejahtera.** Koperasi Anugerah Mina Sejahtera berlokasi di Jl. Borobudur Km 2, Selak, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkin, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bidang usaha Koperasi ini antara lain memproduksi benih ikan Nila sesuai dengan kaidah CPIB, memproduksi pakan ikan berkualitas dengan harga terjangkau, selain itu koperasi juga pengupayakan usaha pengolahan dan pemasaran ikan.
 - 7. Koperasi Mina Sidat Bersatu.** Koperasi Mina Sidat Bersatu merupakan kumpulan pembudidaya ikan sidat yang bergerak dibidang penangkatan, pendederan, pembesaran dan pengolahan ikan sidat, Koperasi in beralamatkan di Jl. Trantana Rt.02, Rw.04, Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
-

8. **Koperasi Produsen Agar Makmur Sentosa.** Koperasi ini berlokasi di Dusun Tlocor Rt 015, Rw 05, Desa Kedungpandang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, kegiatan usaha yang dilakukan Koperasi adalah usaha pembudidayaan secara polikultur antara Rumput Laut Gracilaria dengan Udang maupun Bandeng, saat ini luasan usaha budidaya mencapai 760 Ha dan akan ditingkatkan kembali khususnya untuk komoditas rumput laut sebanyak 400 Ha.
9. **Koperasi Syariah Gapoktan Lanrisang.** Koperasi ini terletak di Kessie Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan usaha utama dari Koperasi ini usaha budidaya ikan payau khususnya udang windu yang dikelola secara tradisional secara turun temurun. Selain itu Koperasi juga berperan dalam penyediaan pakan mandiri yang diproduksi sendiri oleh Koperasi serta berperan sebagai off-taker hasil panen anggota maupun non anggota Koperasi.
10. **Koperasi Produsen Kampung Perikanan Budidaya.** Koperasi ini terletak di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Koperasi ini merupakan tindak lanjut dari pengembangan Kampung Perikanan Budidaya Bandeng Gresik yang telah dilakukan intervensi kegiatan dan bantuan pemerintah.

Anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp.5.039.040.000 dengan realisasi sebesar Rp.5.035.715.200 atau sebesar 99,93%.

SS.3. Kawasan Perikanan Budi Daya yang Berkelanjutan

IKU 6. Percontohan Pengelolaan cluster kawasan budidaya berkelanjutan

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	7	10	30	40	50	125	50	100

Tabel 7. Perolehan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budidaya Berkelanjutan (Kluster) Tahun 2023

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Pembangunan Kluster Tambak Udang	10	8	80
2	Revitalisasi Kluster Tambak Bandeng	5	5	100
3	Perencanaan Teknis untuk rehabilitasi saluran tambak eksisting (DED)	2	2	100
4	Kawasan Budi Daya Udang yang Menjadi Percontohan (Kawasan)	23	35	152
	Total	40	50	125

Pekerjaan pembangunan kluster tambak dan revitalisasi udang dilaksanakan oleh UPT DJPB sebanyak 13 kluster, yang meliputi : (a) BPBAP Situbondo: 2 tambak udang dan 2 tambak

bandeng; (b) BBPBAP Jepara: 3 tambak udang dan 1 tambak bandeng; (c) BPBAP Takalar: 2 tambak udang dan 1 tambak bandeng; dan (d) BPBAP Ujung Batee: 1 tambak udang dan 1 tambak bandeng. Dibandingkan dengan target awal sebanyak 15 kluster maka terdapat 2 capaian kluster udang yang berubah menjadi kluster nila. Kendala yang dihadapi dalam pembangunan kluster tambak dan revitalisasi udang yaitu adanya cuaca ekstrim di beberapa daerah kluster sehingga menyebabkan kendala dalam percepatan pembangunan konstruksi tambak. Upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir kondisi diatas yaitu melakukan pengaturan waktu pelaksanaan kluster dengan memperhatikan kondisi cuaca guna memitigasi kegagalan panen dan keterlambatan dalam pekerjaan konstruksi tambak.

Kegiatan lain yang mendukung Percontohan Pengelolaan Klaster Kawasan Budidaya Berkelanjutan (Klaster) berupa :

1. DED yang berlokasi di 2 kawasan tambak yaitu : Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lampung. Tersedianya DED sebagai acuan dalam melaksanakan peningkatan/pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi guna mendukung produktivitas tambak. Permasalahan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, diantaranya : (i) sulitnya akses menuju saluran sekunder dan tersier, (ii) inventarisasi data sekunder yang terhambat, dan (iii) alat berat pengerukan tidak dapat menjangkau area tambak. Sedangkan solusi yang dilakukan, yaitu : (i) penelusuran saluran dan bangunan dilakukan dengan metode walkthrough, (ii) inventarisasi data dilakukan dengan wawancara ke pemilik tambak maupun anggota Pokdakan dan (iii) metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
2. Kawasan budidaya perikanan budidaya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (kawasan) yang berlokasi di 35 kawasan. Kegiatan tersebut berupa dampak saluran dari hasil pekerjaan PITAP yang bertujuan untuk mengetahui jumlah kawasan perikanan budidaya yang mendapat kemudahan pengairan setelah pekerjaan PITAP. Permasalahan yang ditemui setelah pekerjaan PITAP, diantaranya terjadinya sedimentasi pada saluran irigasi sehingga perlu dilakukan pemeliharaan saluran agar dapat berfungsi secara optimal. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan pemahaman kepada POKLINA terkait pentingnya melakukan pemeliharaan saluran irigasi secara periodik berupa teknik-teknik perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi, serta cara-cara mengatasi masalah yang mungkin terjadi untuk menjaga kontinuitas pemenuhan air baik kualitas maupun kuantitas sehingga produktivitas tambak di lahan yang diairi terus mengalami peningkatan.

Penyerapan anggaran Indikator kinerja Percontohan Pengelolaan Klaster Kawasan Budidaya Berkelanjutan (Klaster), terdiri dari : (1) penyerapan kegiatan pembangunan kluster tambak udang dan bandeng terdapat di UPT DJPB sebagai pelaksana pembangunan kluster; (2) kegiatan DED kawasan tambak yang terdiri 2 paket terserap 99,91% dari Pagu Rp 3.000.000.000 dengan realisasi Rp2.997.446.315 dan (3) kegiatan Kawasan Budi Daya Udang yang Menjadi

Percontohan (Kawasan) terserap 99,90% dari Pagu Rp 1.736.724.000 dengan realisasi Rp 1.734.993.750.

SS.4. Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya

IKU 7. Produksi Perikanan Budi Daya

Realisasi			2023			Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi**	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
14,84	14,64	14,77	20,06	16,79	84,60	24,85	67,57

*juta ton

**angka sangat sementara

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 sebesar 16,97 juta ton dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 yakni sebesar 20,06 juta ton maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 84,60 persen. Produksi perikanan budidaya tahun 2023 naik jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 sebesar 14,77 juta ton.

Jika dilihat selama periode 2019– 2023, volume produksi perikanan budidaya selama waktu tersebut mengalami sedikit kenaikan dengan rata-rata per tahunnya naik sebesar 2,65 persen.

Tabel 8. Perkembangan produksi perikanan budidaya Tahun 2020-2023

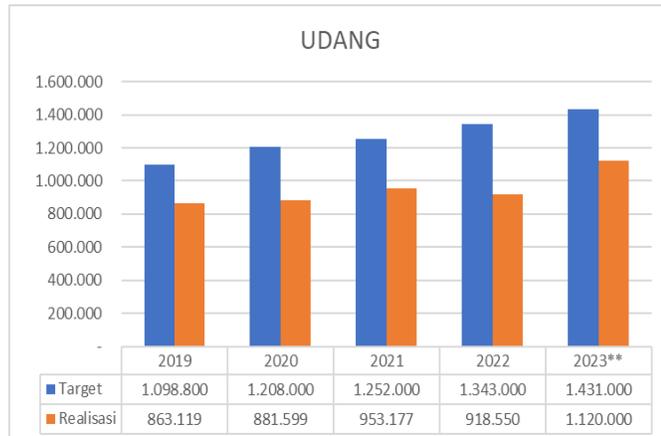
KOMODITAS	2019	2020	2021	2022	2023**	Pertumbuhan (%)
BANDENG	824.239	811.883	780.763	779.747	852.216	0,96
GURAMI	190.389	152.669	149.170	165.702	195.353	1,72
KAKAP	12.503	7.973	8.464	8.642	8.701	- 6,82
KEKERANGAN	48.827	42.310	42.944	49.318	53.347	2,79
KERAPU	13.829	9.478	13.422	12.240	30.934	38,52
LELE	1.088.945	993.768	1.041.422	1.101.883	1.137.807	1,28
MAS	620.831	560.669	651.238	509.471	533.646	- 2,64
NILA	1.317.561	1.172.633	1.300.529	1.356.654	1.364.436	1,20
PATIN	380.130	327.146	332.023	342.292	431.381	4,17
UDANG	863.119	881.599	953.177	918.550	1.120.000	7,14
RUMPUT LAUT	9.775.986	9.618.421	9.092.031	9.234.268	10.766.778	2,77
LAINNYA	289.266	266.467	283.126	297.289	472.919	15,61
Grand Total	15.425.625	14.845.015	14.648.310	14.776.057	16.967.518	2,65

Sumber data Pusdatin

**angka perkiraan

i. Udang

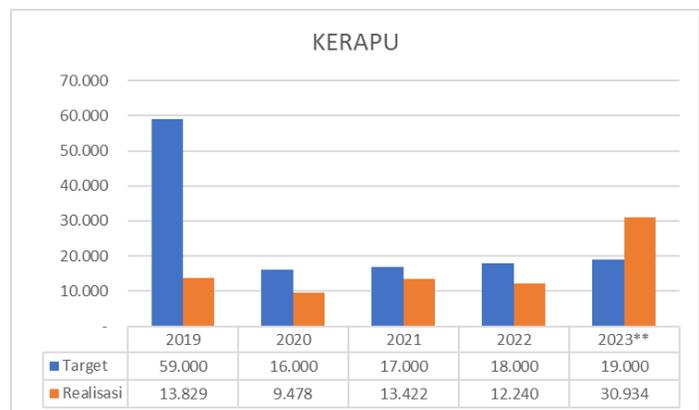
Perkembangan produksi udang nasional tahun 2019 - 2023 mengalami peningkatan dengan peningkatan rata-rata sebesar 7,14% per tahunnya. Pada tahun 2023 produksi udang mencapai target sebesar 78,27%, tidak tercapainya target produksi udang ini terutama disebabkan karena terhambatnya ekspor udang Indonesia karena ada penolakan komoditas ekspor udang di pasar USA, akan tetapi produksi masih tetap meningkat dibandingkan tahun 2022 seiring dengan mulai bergulirnya program terobosan terhadap budidaya udang yang diinisiasi oleh Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB). Ditjen perikanan budidaya telah dan terus mengambil langkah nyata dalam upaya peningkatan volume dan nilai produksi udang adalah (i) Rehabilitasi saluran dan infrastruktur tambak untuk mengembalikan performance tambak sesuai standar kelayakan teknis; (ii) Bantuan sarana budidaya udang yang merupakan stimulus bagi pembudidaya untuk meningkatkan usaha budidaya udang; (iii) Melakukan berbagai kerjasama lintas sektoral dan stakeholders lain untuk mempermudah akses baik infrastruktur, sarana dan prasarana budidaya, serta akses pasar dan permodalan; (iv) Pengembangan pola budidaya berbasis manajemen kawasan/klaster; (v) Penguatan kelembagaan dan pengembangan kemitraan usaha; (vi) Peningkatan input teknologi budidaya yang aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (vii) Pendampingan teknologi secara intensif dan massive terhadap pelaku usaha budidaya udang.



Gambar 10. Grafik perkembangan Produksi Udang 2019-2023

ii. Kerapu

Trend produksi ikan kerapu dari tahun 2019 - 2023 menunjukkan kinerja yang cukup positif. Hal ini bisa dilihat dari trend produksinya yang cenderung naik dari tahun 2020. Produksi ikan kerapu pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 mencapai 30.934 ton atau tercapai targetnya sebesar 162,81 % dari target sebesar 19.000 ton. Tercapainya target dan peningkatan produksi di tahun 2023 mengindikasikan kebangkitan budidaya

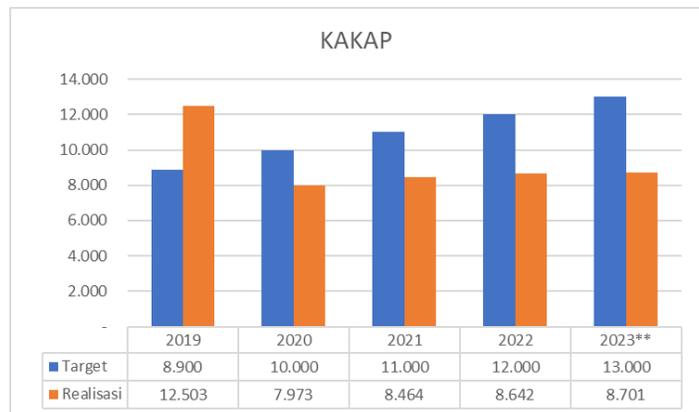


Gambar 11. Grafik perkembangan produksi kerapu 2019-2023

kerapu dapat dilihat dari semakin banyak minat Masyarakat untuk membudidayakan dan negara-negara pengimpor kerapu hidup sudah mulai membuka kran impornya. Untuk lebih memacu peningkatan produksi kerapu ini berbagai upaya telah dilakukan oleh DJPB antara lain (i) Penyediaan benih ikan kerapu yang bermutu di UPT dan unit pembenihan skala rumah tangga (HSRT); dan (ii) Adanya kebijakan program bantuan KJA budidaya ikan kerapu di beberapa daerah potensial yang memicu perkembangan kawasan budidaya kerapu di beberapa daerah potensial.

iii. Kakap

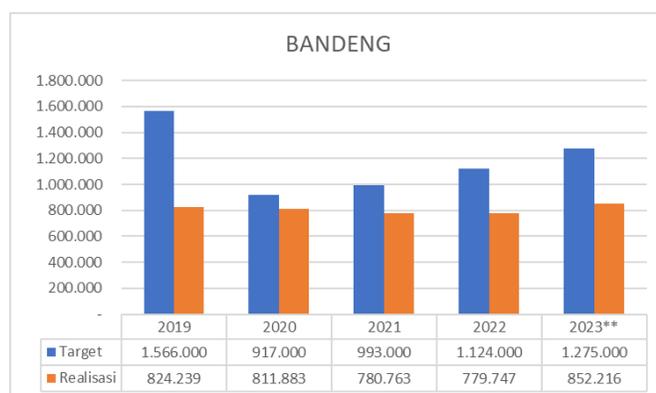
Capaian produksi ikan kakap dari tahun 2019 - 2023 sedikit mengalami kenaikan dengan kenaikan rata-rata sebesar 6,82% per tahun. Kakap merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang cukup digemari sebagai ikan konsumsi sehingga dengan sedikitnya produksi menyebabkan harga ikan kakap cenderung naik. Capaian produksi ikan kakap pada tahun 2023 mencapai 66,93% dari produksi yang ditargetkan. Ketidaktercapaian target produksi ini lebih banyak karena ketersediaan benih ikan kakap yang terbatas. Selain itu semakin banyak masyarakat yang mengusahakan tambak intensif sehingga lahan tambak tradisional yang hasil sampingannya berupa ikan kakap semakin sedikit dan secara tidak langsung berdampak pada produksi ikan kakap itu sendiri. Untuk lebih meningkatkan produksi ikan kakap DJPB telah mengalokasikan bantuan berupa KJA laut dan pengembangan benih kakap di beberapa UPT pusat untuk mendukung budidaya kakap di KJA laut.



Gambar 12. Grafik perkembangan produksi kakap 2019-2023

iv. Bandeng

Perkembangan produksi bandeng dari tahun 2019 - 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,96%. Sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 s.d 2022 karena pandemic dan meningkat kembali pada tahun 2023. Namun Selama kurun waktu tahun 2019 - 2023 target produksi bandeng tidak tercapai.



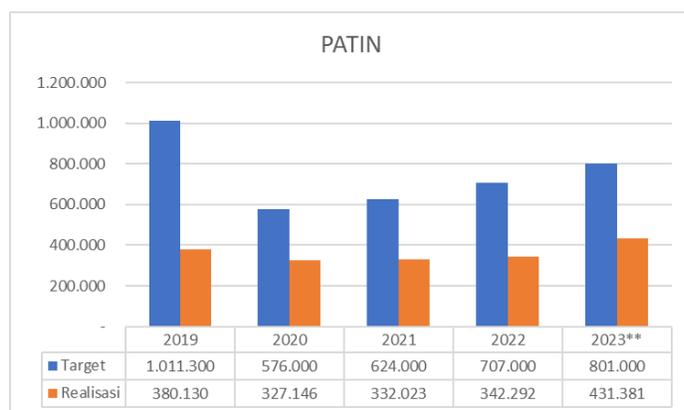
Gambar 13. Grafik perkembangan Bandeng 2019-2023

Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh terbatasnya sentra produksi benih bandeng walaupun berbagai teknologi diversifikasi olahan bandeng yang menyebabkan minat masyarakat akan

produk bandeng tetap tinggi. Indikasi masih adanya ekspor nener juga menyebabkan ketersediaan nener dalam negeri semakin berkurang sehingga semakin sulit untuk mencapai angka yang ditargetkan.

Untuk kembali dapat meningkatkan produksi bandeng dan mencapai target produksinya, upaya yang telah dilakukan Ditjen perikanan budidaya dengan beberapa langkah kebijakan strategis yang akan dilakukan antara lain : a) Membentuk model penerapan industrialisasi bandeng sebagai upaya dalam rangka menumbuh kembangkan usaha budidaya bandeng pada kawasan-kawasan potensial; b) Pengembangan broodstock bandeng dalam upaya pemenuhan kebutuhan benih berkualitas di sentral-sentral produksi; c) Pengembangan input teknologi yang aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; d) Menggandeng Asosiasi Pelaku Usaha Bandeng Indonesia (ASPUBI), yang dalam hal ini diposisikan sebagai partner Pemerintah khususnya dalam mendorong implementasi kebijakan industrialisasi bandeng. Langkah-langkah di atas akan terus di dorong sehingga capaian volume dan nilai produksi periode 2020-2024 akan mampu tercapai.

v. Patin



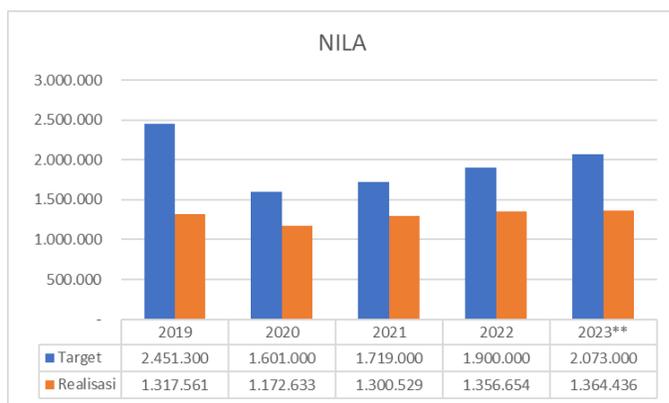
Gambar 14. Grafik perkembangan patin 2019-2023

Produksi ikan patin dari tahun 2019-2023 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4,17%. Volume produksi pada kurun waktu tersebut masih belum mencapai target tahunan yang telah ditetapkan dalam renstra dengan capaian pada tahun 2023 terhadap target sebesar 53,86%. Belum tercapainya produksi ikan patin di tahun 2023 antara lain disebabkan karena masih sulitnya memasarkan ikan patin mengingat ikan patin merupakan ikan

yang masih belum bisa diterima oleh semua etnik di Indonesia, ikan patin terutama banyak disukai di daerah Kalimantan dan Sumatera bagian Selatan sementara itu di pulau Jawa yang merupakan potensi untuk pemasaran penduduknya masih kurang menyukai ikan patin. Disisi lain permasalahan tingginya biaya produksi sebagai akibat dari tingginya harga pakan pabrikan tidak sebanding dengan harga yang berlaku di pasaran, sehingga secara ekonomis tingkat efisiensi masih cukup. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong pengembangan budidaya ikan patin melalui kerjasama sinergi, baik lintas sektoral, swasta maupun stakeholders lain, untuk menjamin ketercapaian produksi ikan patin di tahun kedepan. Kerjasama tersebut diarahkan dalam rangka : (i) Penciptaan peluang pasar yang lebih luas terutama pasar luar negeri seperti pada negara-negara yang banyak tenaga kerja indonesianya seperti Arab Saudi dan daerah timur

tengah lainnya; (ii) Pengembangan input teknologi yang aplikatif, efektif dan efisien; (iii) Pengembangan kawasan budidaya ikan patin secara terintegrasi, serta (iv) Peningkatan nilai tambah produk menjadi hal mutlak dan terus dilakukan yaitu melalui pengembangan diversifikasi produk olahan berbahan baku ikan patin dan pengembangan unit pengolahan ikan patin. Melalui upaya diatas, maka secara langsung akan mampu memberikan jaminan terhadap jalannya siklus bisnis yang positif dan berkesinambungan; (v) Mendorong peningkatan konsumsi ikan patin terutama daerah di luar Sumatera dan Kalimantan.

vi. Nila



Gambar 15. Grafik perkembangan Nila 2019-2023

Produksi ikan nila dari tahun 2019 - 2023 mengalami peningkatan yang cukup baik dengan rata-rata kenaikan 1,20%. Dilihat dari trend capaian produksi terhadap target tahunan menunjukkan bahwa angka produksi nila sampai dengan tahun 2023 belum dapat dicapai. Capaian pada tahun 2023 mencapai 65,82% dari target. Terjadinya peningkatan produksi ikan, hal ini menunjukkan bahwa terjadi geliat pembudidayaan ikan nila di daerah.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target volume produksi pada kurun waktu tersebut, antara lain dikarenakan secara umum kapasitas usaha yang dijalankan pembudidaya masih dalam skala kecil, juga adanya kegiatan rasionalisasi jumlah KJA baik di sungai atau danau juga turut mempengaruhi capaian produksi ikan nila.

Rencana aksi dalam upaya pencapaian kinerja antara lain melalui (i) Pengembangan gerakan minapadi, (ii) Pengembangan budidaya ikan nila melalui intensifikasi dengan Bioflok dan Running Water; (iii) Mendorong pemanfaatan bahan baku lokal untuk pembuatan pakan ikan secara mandiri yang berkualitas; (iv) Ekstensifikasi pada kawasan potensial; serta (v) Penciptaan peluang pasar yang lebih luas.

vii. Ikan Mas

Produksi ikan mas menunjukkan selama tahun 2019 - 2023 mengalami penurunan sebesar 2,64% dan target produksi belum mencapai target. Belum tercapainya target produksi ikan mas terutama disebabkan merebaknya berbagai penyakit ikan yang menyebabkan tingkat produktifitas menurun.



Gambar 16. Grafik perkembangan Mas 2019-2023

Pencapaian target produksi ikan mas pada beberapa tahun belakangan ini dan tahun-tahun ke depan mengalami tantangan dengan adanya kebijakan zero kja secara nyata telah memberikan pengaruh negative terhadap pertumbuhan produksi ikan mas. Namun Ditjen perikanan budidaya tetap berupaya untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dan dalam upaya

pencapaian target volume produksi tersebut, maka dilakukan upaya-upaya yang secara langsung mendorong peningkatan efisiensi produksi, diantaranya : (i) Intensifikasi melalui pengembangan teknologi baik budidaya maupun aspek nutrisi (pakan) yang berkualitas berbasis bahan baku lokal; (ii) Pengembangan kapasitas usaha dengan dukungan penguatan modal bagi usaha skala kecil melalui penguatan kemitraan usaha; (iii) Perluasan akses pasar dan peningkatan nilai tambah; dan (iv) pengembangan budidaya ikan dikombinasikan dengan lahan padi atau minapadi

viii. Lele



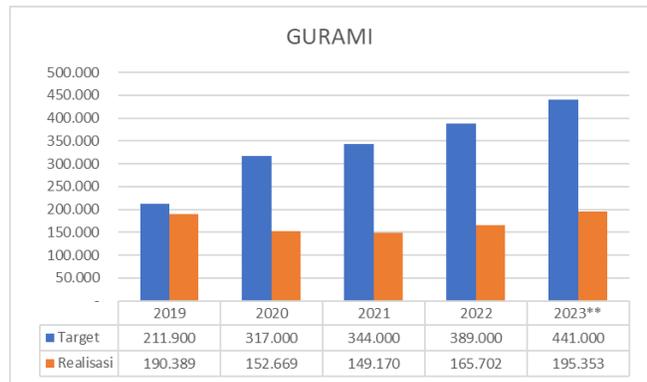
Gambar 17. Grafik perkembangan Lele 2019-2023

Selama kurun waktu tahun 2019 - 2023 produksi ikan lele menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan peningkatan produksi rata-rata sebesar 1,28%. Produksi ikan lele selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Namun di tahun 2021 produksi mulai meningkat mengingat pandemi sudah beralih status menjadi endemi dengan semakin banyak penduduk Indonesia yang mendapat dosis vaksin ketiga, ikan lele yang bisa dibudidayakan

dengan mudah ini memiliki satu kekuatan yaitu, untuk memenuhi lebutuhan lokal dengan adanya hasil positif selama beberapa tahun terakhir maka untuk mempertahankan pencapaian produksi lele di tahun selanjutnya, beberapa kegiatan yang perlu diteruskan adalah sebagai berikut: (i) Pengembangan teknologi budidaya secara intensifikasi dengan bioflok untuk efisiensi pakan; (ii) Penggunaan teknologi budidaya ikan lele dengan terpal sebagai upaya efisiensi pemanfaatan lahan; (iii) Efisiensi pakan melalui bantuan gerakan pakan mandiri; dan (iv) pembangunan pabrik pakan guna memenuhi kebutuhan pakan yang berkualitas dan terjangkau.

ix. Gurame

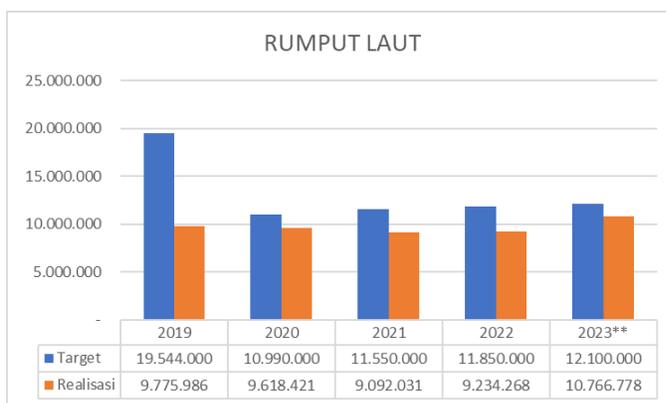
Produksi gurame tahun 2019 - 2023 menunjukkan kinerja yang positif, dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 1,72%. Angka capaian produksi tahun 2023 belum mencapai target produksi dengan capaian sebesar 44,30%. Namun produksinya mengalami peningkatan pada tahun 2023 ini. meningkatnya produksi ini terutama disebabkan karena nilai ekonomis ikan gurame yang cukup tinggi dan pemasarannya yang masih cukup terbuka. Produksi gurame masih didominasi pada beberapa sentra-sentra produksi yang sudah ada, sedangkan disisi lain kapasitas usaha yang dijalankan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan karena proses produksi budidaya yang cukup lama dan semakin sedikitnya ketersediaan pakan alami untuk gurame yang disebabkan karena banyaknya alih fungsi lahan, karena gurame merupakan salah satu ikan yang mengkonsumsi pakan alternatif seperti daun talas ataupun pakan alternatif lainnya.



Gambar 18. Grafik perkembangan Gurame 2019-2023

Pengembangan pola usaha berbasis segmentasi merupakan langkah yang tepat karena secara nyata mampu memberikan keuntungan yang cukup signifikan. Percepatan pengembangan kawasan melalui pendekatan pola segmentasi usaha diharapkan akan mampu menarik minat masyarakat untuk terjun melakukan usaha budidaya gurame.

x. Rumput Laut



Gambar 19. Grafik perkembangan rumput laut 2023

Produksi rumput laut memberikan kontribusi yang paling besar terhadap total produksi perikanan budidaya, dimana secara nasional produksi rumput laut memberikan *share* sebesar 63,45% terhadap produksi perikanan budidaya. Perkembangan produksi rumput laut dari tahun 2019 - 2023 menunjukkan trend yang positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,77%. Kenaikan ini disebabkan terutama

karena beberapa sentra rumput laut mulai bangkit yang disebabkan kualitas bibit yang semakin baik sehingga tahan terhadap kondisi lingkungan dan cepat terserang penyakit, dan juga produksi bibit rumput laut kultur jaringan sudah menjangkau seluruh wilayah sentra budidaya rumput laut di Indonesia.

Selama 5 tahun terakhir akan tetapi rumput laut tetap sebagai penyumbang utama pada total produksi perikanan budidaya, beberapa hal yang mendasari tingginya pencapaian komoditas ini karena budidaya rumput laut mempunyai masa pemeliharaan yang cukup singkat yaitu 45 hari per siklus sehingga perputaran modal usaha dapat lebih cepat, serta cara budidaya yang mudah. Rumput laut juga cocok untuk dibudidayakan di daerah-daerah dengan curah hujan rendah yang merupakan salah satu ciri dari daerah yang masyarakat ekonominya digolongkan bawah. Keuntungan lainnya adalah modal kerja yang relatif kecil, penggunaan teknologi yang sederhana, dan peluang pasar yang masih terbuka lebar mengingat rumput laut merupakan bahan baku untuk beberapa industri, seperti biofuel, agar-agar, caragenan, kosmetik, obat-obatan dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga terus menerus melakukan upaya terobosan diantaranya adalah pengembangan industrialisasi rumput laut di sentra-sentra penghasil rumput laut. Rumput laut Indonesia didominasi spesies *Gracilaria spp* dan *Eucheama cottonii*. Namun beberapa beberapa tahun terakhir mulai berkembang komoditas *Eucheama spinosum* dan *Caulerpa sp*.

Pencapaian volume produksi perikanan budidaya secara keseluruhan untuk semua komoditas utama didukung oleh kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

- Industrialisasi perikanan budidaya, dengan fokus pada komoditas udang, bandeng, rumput laut dan ikan patin. Kegiatan utama dalam industrialisasi, khususnya untuk usaha udang dan bandeng adalah bantuan sarana, perbaikan saluran tersier, perbaikan tambak, fasilitasi sistem kemitraan serta pembinaan dan pendampingan teknis budidaya
- Pengembangan sistem perbenihan melalui penguatan broodstock center : i) Pelepasan jenis dan/atau varietas ikan unggul bekerjasama dengan unit kerja lainnya, yaitu telah dilakukan pelepasan sebanyak 10 varietas induk unggul (Udang vaname “Global Gen”, Ikan Batak “Tor Soro”, Nila Nirwana II, Nila Sultana, Nila Srikandi, Kerapu Cantang, Nila Anjani, Nila Merah Nilasa, Nila Jantan Pandu dan Nila Betina Kunti, Lele Sangkuriang dua, Udang Windu Domestikasi); ii) Gerakan Penggunaan Induk Ikan Unggul (GAUL); iii) Penyusunan regulasi dan perbanyak protokol induk ikan unggul; serta iv) Pengembangan jaringan informasi dan distribusi ikan.
- Pengembangan sistem produksi melalui (i) Pengembangan input teknologi yang sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (ii) Meningkatkan daya saing produk hasil produksi budidaya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB); (iii) Pengembangan percontohan usaha perikanan budidaya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan budidaya berkelanjutan; (iv) Pengembangan minapadi sebagai bagian dari upaya mendapatkan nilai tambah ganda.
- Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan melalui kegiatan terobosan utama: (i) Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana UPTD Provinsi; (ii) Normalisasi saluran irigasi tambak bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum; (iv) Penataan dan rehabilitasi kawasan tambak dalam rangka Gerakan Revitalisasi Tambak;

- (v) Pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pengelolaan jaringan irigasi tambak partisipatif (PITAP) di kawasan industrialisasi; (vi) Pengembangan kawasan dan penguatan operasional industrialisasi perikanan budidaya di Kab/Kota Minapolitan/Industrialisasi; dan (vii) Pemberian bantuan sarana dan prasarana lainnya seperti KJA, ekskavator dan mesin pellet
- Pengembangan budidaya rumput laut kultur jaringan
- Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan, dengan terobosan utama adalah (i) Pembangunan Posikandu (Pos Pelayanan Ikan Terpadu); (ii) Pengembangan *National Residu Monitoring Plan* (NRMP) yang merupakan suatu panduan/perencanaan untuk mengontrol residu obat kimia dan bahan biologis lainnya; dan (iii) Pengembangan vaksin untuk mengatasi penyakit ikan.
- Pengawasan dan Penerapan Teknologi Adaptif Perikanan Budidaya yang dilakukan oleh 15 UPT Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.

IKU 9. Produksi Ikan Hias

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
1,67	1,43	1,47	1,66	1,64	1,73	105,44	1,73	100,58

Realisasi volume produksi ikan hias Indonesia pada triwulan 4 tahun 2023 mencapai 1,73 milyar ekor atau mencapai 105,4 % dari target triwulan 4 sebesar 1,64 miliar ekor, artinya target ikan hias ditahun 2022 ini telah terlampaui.

Peningkatan produksi ikan hias pada tahun 2023 dipengaruhi oleh semakin diminatinya ikan hias asli Indonesia di pasar dunia, seperti arwana yang mulai merambah pasar dunia selain pasar asia, arwana juga sudah mulai memasuki pasar Amerika dan Eropa, seiring dengan peningkatan produksi ikan hias nilai ekspor ikan hias indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan terbukti dengan meningkatnya peringkat Indonesia dalam negara pengekspor ikan hias di dunia menjadi peringkat 2 terbesar (data trademap 2023), disamping itu semakin membaiknya kondisi pandemi covid-19 juga memberikan pengaruh yang cukup baik bagi perkembangan budidaya ikan hias, dukungan terhadap budidaya ikan hias diwujudkan oleh DJPB dengan menetapkan beberapa kampung ikan hias diantaranya Bogor, Karawang, Blitar dan Kediri, dengan ditetapkannya kabupaten-kabupaten tersebut sebagai kampung ikan hias dengan berbagai komoditas ikan hias yang menjadi unggulan seperti Kabupaten Blitar dengan budidaya koi dan mas koki, Kediri budidaya cupang, dengan adanya kampung ikan hias ini diharapkan dapat lebih menggairahkan pembudidaya ikan hias dalam berinovasi mengembangkan jenis-jenis ikan hias dengan strain yang baru dan bukan merupakan jenis ikan yang invasif yang sudah jelas pelarangannya, diharapkan juga pembudidaya ikan hias mampu mengembangkan ikan hias endemik lokal yang cukup eksotis dan cukup banyak peminatnya di pasar luar negeri terutama USA dan Eropa.

Tabel 9. Produksi Ikan Hias Menurut Komoditas Tahun 2023 ** (1000 ekor)

KOMODITAS	TARGET	REALISASI
TOTAL	1.131.600	1.729.230
Koi	334 598	511 .309
Mas Koki	57 6985	88 .169
Cupang	149 254	228 .079
Plati	39 813	60 .839
Kuda Laut	5	7
Manfis	32 448	49.585
Botia	12 606	19.263
Discuss	6 889	10.528
Oskar	13 167	20.121
Gapi	40 235	61.484
Banggai CardinalFish	29	44
Moly	51 414	78.567
Nemo	186	285
Corydoras	8 740	13.357
Arwana	8 963	13.969
Blue Devil/Betok Ambon	25	38
Lainnya	375 532	573.861

Keterangan: **) angka sangat sementara

SS.5. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya ini merupakan sasaran baru menggantikan sasaran strategis terselenggaranya pengendalian dan pengawasan perikanan Budi Daya yang partisipatif. SS ini diganti untuk perbaikan dari hasil temuan atas evaluasi SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya yang di evaluasi KeMenPan tahun 2021.

IKU 9. Prosentase Jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu)

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	99,66	99,80	99,89	97	100	103,09	97	103,09

Pada tahun 2023, jumlah sampel monitoring residu yang ditetapkan dalam dokumen rencana monitoring residu nasional (RMRN) 2023 sebanyak 5,000 sampel yang dilaksanakan di 26 Provinsi. Ruang lingkup kegiatan monitoring residu mencakup pengambilan sampel, penanganan sampel, pengiriman sampel dan pengujian sampel guna memastikan penerapan jaminan mutu

dan keamanan produk perikanan telah memenuhi persyaratan global. Pelaksanaan kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Nomor: 37/PERMEN-KP/2019 tentang pengendalian residu pada kegiatan pembudidayaan ikan konsumsi. Monitoring residu dilaksanakan berdasarkan RMRN memuat perencanaan monitoring residu untuk periode 1 (satu) tahun, diantaranya: target lokasi, jenis komoditas, jumlah sampel, substansi uji, dan laboratorium Acuan & Pengujian yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

Lokasi yang menjadi obyek monitoring residu merupakan provinsi yang mempunyai kontribusi besar terhadap produksi perikanan budidaya nasional. Dalam hal ini, Provinsi sebagai pelaksana monitoring residu pada tahun 2023 sebanyak 26 (dua puluh enam) Provinsi, yang meliputi: Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

Pengujian sampel residu dilaksanakan di 15 laboratorium pengujian sesuai dengan yang tercantum di dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 63 Tahun 2023 tentang Laboratorium Acuan dan Laboratorium Pengujian Dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional Tahun 2023. Pengujian sampel residu dilakukan terhadap 5 komoditas perikanan budidaya yaitu udang, nila, bandeng, lele dan patin terhadap substansi yang tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Nomor: 37/PERMEN-KP/2019.

Target Indikator Kinerja “Persentase Jumlah Sampel Residu yang Memenuhi Ketentuan (Sampel Bebas Residu) Tahun 2023 sebesar 97% selanjutnya realisasi terhadap Indikator kinerja tersebut sebesar 100% atau tidak terdeteksi residu. Capaian Indikator kinerja dihitung berdasarkan Jumlah sampel residu dengan hasil uji compliance dibandingkan dengan realisasi jumlah sampel monitoring residu di 26 provinsi. Uraian capaian “Prosentase Jumlah Sampel Residu yang Memenuhi Ketentuan (Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Jumlah sampel monitoring residu yang terealisasi pada tahun 2023 sebanyak 5.148 sampel.
2. Tidak ditemukan sampel residu yang *non compliance* atau terdeteksi residu sehingga jumlah sampel yang *compliance* atau bebas residu sebanyak 5.148 sampel atau 100%.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Prosentase Jumlah Sampel Residu yang Memenuhi Ketentuan (bebas residu) Tahun 2023

No	Provinsi	Komoditas	Sampel		Non Compliance	Compliance	Porsentas Compliance (%)
			Target	Realisasi			
1	Aceh	Udang	170	172	0	172	100.00%
2	Sumatera Utara	Udang	120	127	0	127	100.00%

Laporan Kinerja Direktorat Jendera Perikanan Budi Daya Tahun 2023

No	Provinsi	Komoditas	Sampel		Non Compliance	Compliance	Porsentas Compliance (%)
			Target	Realisasi			
		Nila	56	56	0	56	100.00%
3	Sumatera Barat	Udang	20	20	0	20	100.00%
		Nila	36	41	0	41	100.00%
4	Riau	Udang	22	35	0	35	100.00%
		Patin	52	52	0	52	100.00%
5	Jambi	Patin	53	53	0	53	100.00%
6	Bangka Belitung	Udang	57	59	0	59	100.00%
7	Sumatera Selatan	Udang	166	174	0	174	100.00%
		Patin	67	67	0	67	100.00%
8	Bengkulu	Udang	40	40	0	40	100.00%
9	Lampung	Udang	409	418	0	418	100.00%
10	Banten	Udang	44	44	0	44	100.00%
11	Jawa Barat	Udang	539	453	0	453	100.00%
		Lele	139	185	0	185	100.00%
		Nila	91	137	0	137	100.00%
12	Jawa Tengah	Udang	176	187	0	187	100.00%
		Nila	88	88	0	88	100.00%
13	DI Yogyakarta	Udang	40	40	0	40	100.00%
14	Jawa Timur	Udang	406	426	0	426	100.00%
		Bandeng	106	114	0	114	100.00%
		Nila	107	122	0	122	100.00%
		Lele	105	111	0	111	100.00%
15	Bali	Udang	55	57	0	57	100.00%
16	Nusa Tenggara Barat	Udang	497	503	0	503	100.00%
17	Kalimantan Barat	Udang	58	61	0	61	100.00%
18	Kalimantan Selatan	Udang	80	80	0	80	100.00%
19	Kalimantan Tengah	Udang	5	5	0	5	100.00%
		Patin	35	39	0	39	100.00%
20	Kalimantan Timur	Udang	118	118	0	118	100.00%
21	Kalimantan Utara	Udang	92	98	0	98	100.00%
22	Sulawesi Tenggara	Udang	316	323	0	323	100.00%
23	Sulawesi Tengah	Udang	168	168	0	168	100.00%
24	Sulawesi Selatan	Udang	190	194	0	194	100.00%
		Bandeng	94	98	0	98	100.00%
25	Sulawesi Barat	Udang	101	101	0	101	100.00%
26	Gorontalo	Udang	82	82	0	82	100.00%
			5000	5148	0	5148	100.00%

Meskipun capaian Indikator Kinerja “Prosentase jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan” telah melampaui target yang ditetapkan namun dalam pelaksanaan monitoring residu masih ditemui permasalahan, diantaranya: (i) pengambilan sampel di lokasi unit budidaya yang bersertifikat masih terbatas, (ii) masih terdapat kekeliruan dalam penginputan data sampel, dan (iii) masih ditemukan keterlambatan Laboratorium dalam mengupload Laporan Hasil Uji (LHU).

Berkaitan dengan pencapaian indikator kinerja yang telah melampaui target, maka perlu upaya untuk meminimalisir permasalahan yang ditemui dengan mengingatkan Dinas KP Provinsi agar melaksanakan kegiatan pengendalian residu sesuai dengan ketentuan melalui penyampaian Surat Nomor : B.54/DJPB.2/PB.240/I/2024, 8 Januari 2024. Pelaksanaan kegiatan monitoring residu menggunakan anggaran dekonsentrasi meskipun pada akhirnya anggaran tersebut mengalami *Automatic Adjustment* sejumlah Rp 1.500.000.000 dari Rp 12.500.000.000 namun pencapaian target pengambilan sampel residu melebihi target 5000 sampel. Adapun pagu pasca *Automatic Adjustment* kegiatan monitoring residu sebesar Rp 11.500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp10.770.977.073 atau 97.92%.

SS.6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

IKM 10. Indeks profesionalitas ASN DJPB (%)

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
63,92	74,70	80,94	83,35	81	88,37	109,09	85	103,96

Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023, berdasarkan hasil pengukuran Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP tanggal 9 Januari 2024 yaitu **88,37 (kategori tinggi)** terdiri dari **Kualifikasi 20,99, Kompetensi 37,29, Kinerja 26,08** dan **Disiplin 5,00**. Target Tahun 2023 adalah 81. Berdasarkan capaian Tahun 2023 sebesar 88,37 dari target Tahun 2023 sebesar 81 yang sudah melebihi target yaitu 109,09%.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menunjang tercapainya IKU ini sampai dengan tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

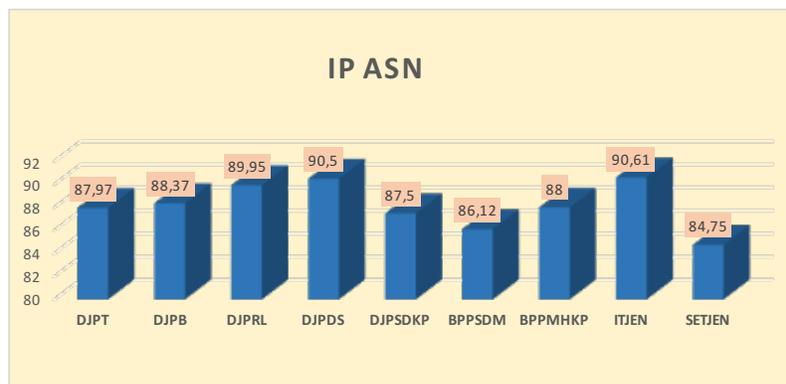
1. Dimensi kualifikasi, belum ada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pencantuman Gelar Pendidikan.
2. Dimensi kompetensi, telah dilaksanakan pengembangan kompetensi melalui Diklat dan Seminar/*Workshop*/sejenis, dengan rincian peserta Diklat mencapai 345 orang.

3. Dimensi Kinerja, sedang dilaksanakan penilaian kinerja PNS periode final pada Bulan Januari 2024.

Permasalahan dalam pencapaian IKU ini antara lain :

1. Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 418/SJ.3/KP.520/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 hal Pelaksanaan Penyesuaian Pendidikan dan Pencantuman Gelar bagi PNS yang memiliki pendidikan lebih tinggi, sehingga terdapat usul pencantuman gelar pendidikan yang dikembalikan karena dianggap tidak memenuhi kriteria. Kegiatan tersebut merupakan elemen pendukung dari dimensi kualifikasi atau merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan mutasi.
2. Pelaporan pelaksanaan telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, *workshop*, dan seminar belum berjalan maksimal. Kegiatan tersebut merupakan elemen pendukung dari dimensi kompetensi atau merupakan bagian dari kegiatan kebutuhan kompetensi ASN;
3. Masih terdapat kendala teknis pada aplikasi sehingga belum dapat dilakukan monitoring kepatuhan pengisian SKP (baik penyusunan maupun pelaksanaan kinerja). Kegiatan tersebut merupakan elemen pendukung dari dimensi kinerja atau merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan kinerja ASN;
4. Pelaporan penjatuhan hukuman disiplin ringan yang menjadi kewenangan unit kerja belum berjalan maksimal. Kegiatan tersebut merupakan elemen pendukung dari dimensi disiplin atau merupakan bagian dari kegiatan pembinaan kode etik dan disiplin ASN.

Perbandingan capaian IP ASN pada unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2023, tersaji pada grafik di bawah.



Gambar 20. Grafik Perbandingan Capaian IP ASN Lingkup KKP Tahun 2023

Anggaran untuk mendukung IKU ini adalah sebesar Rp. 1.218.557.000,-, dengan Realisasi anggaran untuk mendukung IKU ini sejumlah Rp. 1.207.846.700,- atau sebesar 99,12% dari keseluruhan anggaran.

IKM 11. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
5	7	8	11	13	13	100	14	92,85

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dari tahun 2014 s/d 2023 telah memiliki 13 (tiga belas) unit kerja yang telah berpredikat menuju WBK. Predikat tersebut diperoleh atas hasil penilaian dari Tim Penilai Nasional (Kemenpan-RB) dan Tim Penilai Internal (KKP) kepada:

1. BBPBAT Sukabumi pada Tahun 2014 memperoleh Predikat WBK dari TPN (Nasional);
2. BPBL Ambon pada tahun 2018 memperoleh Predikat WBK dari TPI (KKP);
3. BPBAT Mandiangin pada tahun 2018 memperoleh Predikat WBK dari TPI (KKP);
4. BPBL Batam pada Tahun 2019 memperoleh Predikat WBK dari TPI (KKP);
5. BBPBL Lampung pada Tahun 2020 memperoleh Predikat WBK TPI (KKP);
6. BPIU2K Karangasem pada Tahun 2020 memperoleh Predikat WBK TPI (KKP);
7. BBPBAP Jepara pada Tahun 2021 memperoleh Predikat WBK dari TPN (Nasional);
8. BPKIL Serang pada Tahun 2021 memperoleh Predikat WBK dari TPI (KKP);
9. BPBL Lombok pada Tahun 2022 memperoleh Predikat WBK dari TPI (KKP);
10. BPBAT Jambi pada Tahun 2022 memperoleh Predikat WBK dari TPI (KKP);
11. BPBAP Situbondo pada Tahun 2022 memperoleh Predikat WBK dari TPI (KKP);
12. BPBAP Ujung Batee pada Tahun 2023 memperoleh Predikat WBK dari TPI (KKP); dan;
13. BPBAP Takalar pada Tahun 2023 memperoleh Predikat WBK dari TPI (KKP).

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU ini pada triwulan IV tahun 2023 adalah Pembinaan dan Pendampingan Program WBK/WBBM pada unit kerja sebagai berikut:

1. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BPBAP Ujung Batee pada tanggal 11-13 Oktober 2023;
2. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BBPBAP Jepara pada tanggal 25-28 Oktober 2023;
3. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BPBAT Mandiangin pada tanggal 22-24 November 2023;
4. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BPIUUK Karangasem pada tanggal 22-24 November 2023;

5. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BBPBAP Jepara pada tanggal 12-15 Desember 2023;
6. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BBPBAT Sukabumi pada tanggal 19-21 Desember 2023;
7. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BLUPPB Karawang pada tanggal 22 Desember 2023.

Beberapa upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Budidaya dalam rangka pencapaian indikator ini terutama terkait WBK antara lain:

1. Berkoordinasi dengan unit kerja UPT DJPB untuk mengupdate dokumen/data dukung pelaksanaan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM
2. Berkoordinasi dengan unit kerja UPT DJPB untuk segera menindaklanjuti hasil temuan.

Anggaran untuk mendukung IKU “Nilai Rata-Rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP” tahun 2023 realisasi mencapai Rp.370.997.900,- dari pagu sebesar Rp.412.100.000,- atau sebesar 99,95%.

IKM 12. Batas tertinggi Prosentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen perikanan Budi Daya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2022 (%)

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
0,02	0,14	0,2	0,03	≤ 0,5	0,38	199,62	≤ 0,5	199,62

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPB dibandingkan realisasi anggaran TA. 2022 adalah Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPB merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan Keuangan TA. 2022 (audit) tidak melebihi 0,5%, dengan capaian pada tahun 2023 0,38% atau persentase capaian sebesar 199,62%

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah tanggapan yang diberikan oleh satker tidak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK. Permasalahan lainnya muncul berasal dari

sering ditemukannya kurang volume dalam pelaksanaan pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi barang antara kontrak dan barang yang diadakan sehingga menimbulkan potensi kerugian negara.

Beberapa upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Budi Daya dalam rangka pencapaian indikator ini terutama terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) antara lain:

1. Penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2022 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya.
2. Penyelesaian saldo utang kepada pihak ketiga.
3. Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi oleh masing-masing satker lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya serta pencatatan persediaan dalam aplikasi.
4. Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan probity audit dan reviu atas pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan hingga pembayaran.
5. Memperbaiki rencana umum pengadaan, melakukan perencanaan kegiatan dengan matang, serta meningkatkan kompetensi penanggung jawab kegiatan dalam rangka pemeriksaan fisik hasil pekerjaan.

Perbandingan capaian Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPB dibandingkan realisasi anggaran TA. 2022 pada unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2023, tersaji pada grafik di bawah.



Gambar 21. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPB dibandingkan realisasi anggaran TA. 2022

Anggaran dalam rangka penyelesaian tindak lanjut guna mendukung kegiatan prioritas KKP sebesar Rp196.000.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp195.999.200 atau sebesar 99.99% untuk kegiatan perjalanan dinas.

IKM 13. Nilai PM SAKIP DJPB (nilai)

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022*	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
85,88	86,70	86,54	80,03	80,5	80,83	100,41	82	98,57

* adanya perubahan cara perhitungan, dari yang sebelumnya menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Evaluasi SAKIP sesuai Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, berubah menggunakan LKE sesuai Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021,

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP. Target indikator nilai AKIP Ditjen Perikanan Budi Daya pada tahun 2023 adalah 80,50 (kategori A/Memuaskan).

Tahun 2023 penilaian AKIP Ditjen Perikanan Budi Daya dilaksanakan pada bulan Juli 2023 oleh Inspektorat Jenderal KKP melalui desk study dan penilaian lapangan dengan capaian 80,83 dari target 80.50 atau mencapai 100,41%. Capaian tersebut sesuai hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit kerja Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dengan evaluasi terhadap lima komponen utama SAKIP yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi. Selain itu, Selanjutnya disampaikan dilakukan juga evaluasi atas dokumen yang meliputi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022, Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen terkait lainnya.

Terhadap catatan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 tersebut, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan Nilai AKIP pada tahun mendatang, yaitu: peningkatan kualitas komponen SAKIP yang terus ditingkatkan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. aspek yang menjadi prioritas pada peningkatan aspek SAKIP ditahun 2023 adalah aspek pengukuran kinerja, dilakukan dengan melakukan verifikasi capaian kinerja setiap triwulan pada setiap entitas baik pusat maupun UPT Ditjen Perikanan Budi Daya di daerah pengukuran kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan indikator kinerja yang tepat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan program dan kegiatan .

Keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain dengan menjalankan rencana aksi yang telah disusun untuk meningkatkan Nilai AKIP di Tahun 2023, antara lain :

1. Melakukan perbaikan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi;
2. Meningkatkan peran serta UPT Ditjen Perikanan Budi Daya dalam pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya;
3. Melakukan pelaporan tepat waktu, dan melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak;
4. Peningkatan kompetensi pengelola kinerja satker lingkup Ditjen Perikan Budi Daya melalui Sharring sessios atas implementasi SAKIP dan reformasi Birokrasi (RB) tematik pada Provinsi DIY Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan pada pada tanggal 1-3 November 2023.

Perbandingan Nilai PM SAKIP ada unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2023, tersaji pada grafik di bawah.



Gambar 22. Grafik capaian Nilai PM SAKIP Limgkup KKP Tahun 2023

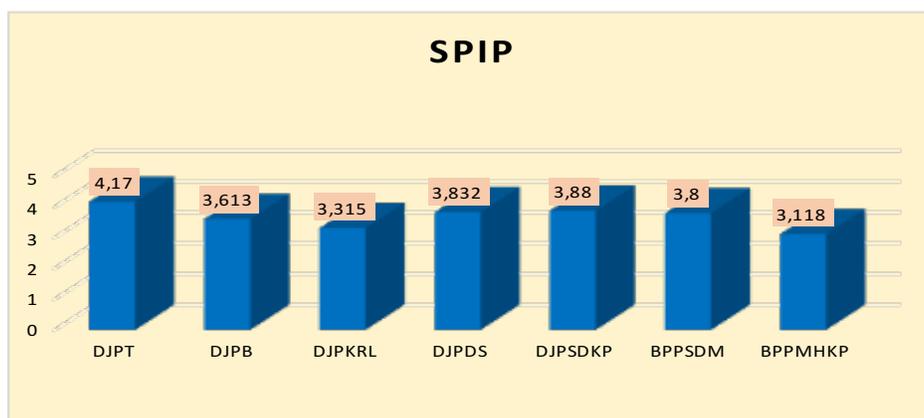
IKM 14. Tingkat Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Perikanan Budi Daya

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
3,44	4	3,87	3,81	3,1	3,6	116,13	3,3	109,1

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022/2023 yang dilaksanakan oleh Tim Asesor KKP telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Tim Penjaminan Kualitas dengan simpulan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP KKP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Hasil penilaian dimaksud dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP digunakan sebagai Pengukuran Indikator Kinerja Utama pada Tingkat Unit Eselon I yang hanya diambil dari nilai komponen Struktur dan Proses (Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1) dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Mitra. Adapun capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada Ditjen Perikanan Budi Daya adalah sebesar “3,613” dari target nilai sebesar “3,100”.

Perbandingan capaian SPIP ada unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2023, tersaji pada grafik di bawah.



Gambar 23. Grafik capaian SPIP lingkup KKP Tahun 2023

Permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya evaluasi berkala atas penerapan standar kompetensi dan SOP-SOP kepegawaian secara berkala, formal dan terdokumentasi. Kurangnya evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas kebijakan dan prosedur terkait dengan pembinaan SDM. Juga kurangnya evaluasi atas pengamanan umum dan pengendalian TI secara berkala dan juga kurangnya melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pemisahan tugas secara berkala, formal dan terdokumentasi.

Rencana aksi kedepan yaitu Penilaian maturitas SPIP yang dilakukan oleh Tim Asesor KKP ini diharapkan bukan hanya untuk kebutuhan status, namun juga harus memastikan optimalnya kebermanfaatannya SPIP bagi peningkatan performa dan ketercapaian tujuan organisasi. Untuk itu

rencana aksi yang harus dilakukan oleh DJPB adalah melakukan atau menindaklanjuti rekomendasi yang sudah diberikan oleh Tim Asesor KKP.

IKM 15. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (%)

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
76,10	73,89	86,7	94,52	75	95,48	127,31	80	119,35

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Ditjen Perikanan Budi Daya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2023 (Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023) dan telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh unit eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya yang menjadi objek pengawasan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 (31 Desember 2023). LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Untuk unit kerja pada level II yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/ rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja level II yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran dan untuk kumulatif setahun maka diberi nilai maksimal target setiap triwulan, dimana untuk Triwulan yaitu sebesar 100%.

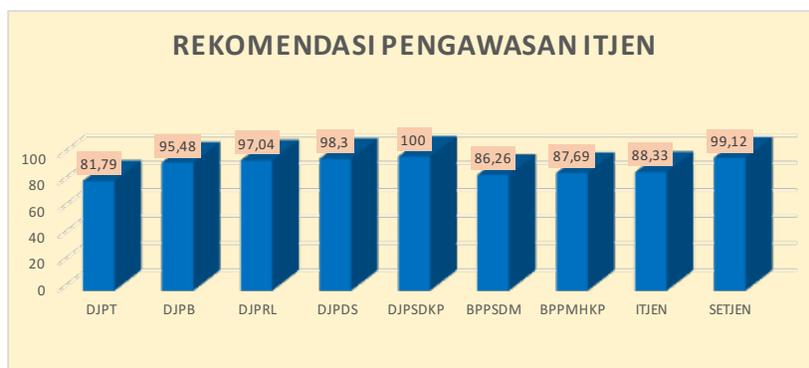
Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar semua rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti secara tepat waktu, melalui:

1. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindaklanjut rekomendasi yang disampaikan sampai tuntas.
2. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat III sebagai mitra DJPB untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi sampai selesai.

Anggaran dalam rangka penyelesaian tindak lanjut guna mendukung kegiatan prioritas KKP sebesar Rp196.000.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp195.999.200 atau sebesar 99.99% untuk kegiatan perjalanan dinas.

Permasalahan muncul karena belum semua satker dapat menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja secara tuntas. Rencana aksi ke depan adalah meningkatkan koordinasi dengan satker terkait guna menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan

Perbandingan capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2023, tersaji pada grafik di bawah.



Gambar 24. Perbandingan capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2023

IKM 16. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Ditjen Perikanan Budi Daya

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
92,47	100	99,92	100	92	115,83	125,90	94	120,21

Sistem manajemen pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah atau swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali. Indikator persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar merupakan cascading adopsi langsung dari level 0 KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan teknologi informasi platform Portal Collaboration Oêce dalam penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan KKP dengan alamat *web* <https://portal.kkp.go.id>. platform Portal Collaboration Oêce ini, pegawai KKP dapat melakukan interaksi dalam bentuk uraian teks, gambar, audio, video maupun penyebaran informasi dan *polling*.

Portal dapat diakses melalui laman [https:// portal.kkp.go.id/](https://portal.kkp.go.id/) dengan Username: NIP/e- mail KKP dan Password: password e-mail KKP pada modul Pengetahuan. Portal Collaboration Oêce modul

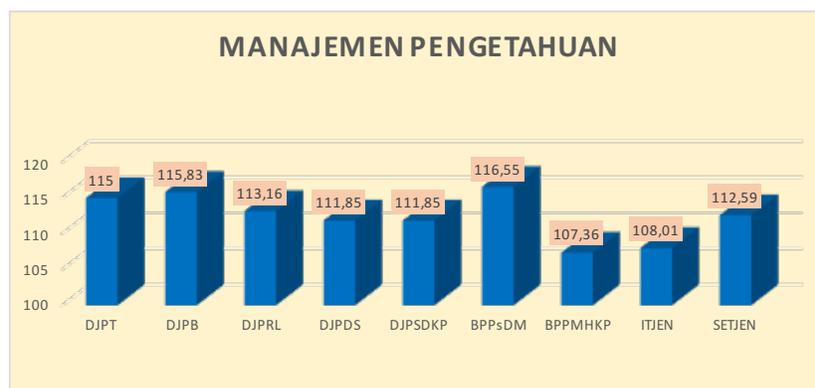
pengetahuan merupakan merupakan teknologi informasi yang digunakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penerapan manajemen pengetahuan dilingkungan KKP.

Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang Terintegrasi pada Portal Collaboration Oêce di laman <https://portal.kkp.go.id> dilakukan dalam rangka menindaklanjuti perubahan Mekanisme Kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana pejabat yang akan dinilai keaktifannya adalah pejabat setingkat eselon 2 dan Ketua Tim Kerja dengan Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4 point.

Perhitungan capaian indikator ini pada tahun 2023 berubah dari yang semula diperoleh dari 3 komponen, yaitu keikutsertaan dalam sistem manajemen pengetahuan (bobot 10%), keaktifan pimpinan dalam berinteraksi dan berbagi pengetahuan (bobot 70%), serta dokumen akuntabilitas kinerja yang diunggah (bobot 20%) menjadi hanya keaktifan (100%). Hal ini sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor: 2659/SJ.7/TU.210/IX/2023 Tanggal 4 September 2023 tentang mplementasi Portal Collaboration Oêce Triwulan 3 Tahun 2023 dan Penyampaian Perubahan Manual IKU Manajemen Pengetahuan Lingkup KKP.

Kendala yang dihadapi yaitu: (i) Dikarenakan sosialisasi Pengukuran capaian Manajemen Pengetahuan *Collaboration Office* dilakukan di akhir periode sehingga waktu penilaian sangat terbatas. (ii) Sosialisasi penggunaan platform *Collaboration Office* belum secara maksimal dilakukan (iii) Peserta belum terbiasa dengan platform *Collaboration Office* sehingga perlu waktu penyesuaian.(iv) minimal nilai yang didapat adalah 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 sehingga peserta harus memposting narasi kegiatan paling tidak 10 kali.

Perbandingan Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2023, tersaji pada grafik di bawah.



Gambar 25. Perbandingan Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2023

Adapun dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Hubungan

Masyarakat dengan capaian pada triwulan 4 yakni sebesar 96,38% dari anggaran sebesar Rp6.110.438.000.

IKM 17. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya

Realisasi				2023*			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	75	85,88	114,51	76	113

*tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang nama ikunya adalah Unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik.

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi tersebut dapat berpedoman pada PERMENPANRB No. 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga. Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara.

Tujuan adanya kebijakan inovasi pelayanan publik adalah untuk : (i) Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik; (ii) Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik; (iii) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (iv) Meningkatkan kepuasan masyarakat. Sebuah inovasi dapat berupa : (i) penggabungan unsur-unsur baru; (ii) kombinasi baru dari unsur yang ada; (iii) perubahan signifikan atau berawal dari cara tradisional dalam melakukan sesuatu; dan (iv) mengacu pada produk baru, kebijakan dan program baru, pendekatan baru, dan proses baru. Jadi, Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Jenis Inovasi Pelayanan Publik yang dapat diikutsertakan berupa pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu pelayanan yang dilakukan dengan cara kontak langsung antara pemberi dan pengguna layanan. Dan pelayanan tidak langsung, yaitu upaya pembaharuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi Pelayanan Publik harus memenuhi kriteria adanya perbaikan pelayanan, memberikan manfaat bagi perbaikan sistem dan masyarakat, berjalan lebih dari 1 tahun, dapat direplikasi dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Target IKU “Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya” tahun 2023 adalah 75. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah menyampaikan Usulan Inovasi Pelayanan Publik lingkup DJPB untuk diusulkan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2023, Nota Dinas Nomor 934/DJPB.1/OT.710/IV/2023 tanggal 18 April 2023 sebagai berikut:

NO.	JUDUL INOVASI	UNIT PENGUSUL
1.	PUSTINA (Patin Unggul Sakti Nusantara)	BPBAT Sungai Gelam
2.	SMART KIT	BPKIL Serang

Capaian IKU telah diperoleh berdasarkan Berita Acara Hasil Sidang Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: B.1531/SJ.7/TU.220/IV/2023, yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 18 April 2023. Adapun Capaian Nilai Hasil Akhir Proposal Inovasi Pelayanan Publik sebagai berikut



Gambar 26. Capaian Capaian Nilai Hasil Akhir Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan UPT lingkup DJPB agar bisa menciptakan inovasi lainnya, diharapkan inovasi yang telah ada dapat diterapkan dan dapat diadopsi oleh unit kerja lainnya.

IKM 18. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
8,8	75,48	86,80	86,15	77,5	80,91	104,40	80	101,14

*terdapat perbedaan cara perhitungan untuk periode 2020-2024

Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya merupakan suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi

kegiatan prioritas dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/ atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain:

1. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
2. memiliki anggaran besar;
3. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
4. mendukung pencapaian prioritas nasional;
5. merupakan arahan direktif presiden; dan
6. pertimbangan lainnya.

Target Indikator ini pada Tahun 2023 adalah sebesar 77,50% dan diukur secara tahunan pada Triwulan IV. Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi terhadap kegiatan prioritas/bantuan pemerintah pada lingkup KKP Tahun 2023 bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Puslatluh BPPSDMKP). Evaluasi dilaksanakan secara uji petik dengan melibatkan Penyuluh Perikanan dan Auditor Inspektorat Jenderal, pada tanggal 9 sampai dengan 13 Oktober 2023, meliputi kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB), Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDS), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) dan BPPSDMKP.

Uji petik dilakukan pada 7 Provinsi, yaitu 1) Jawa Barat; 2) Jawa Timur; 3) Kalimantan Timur; 4) Sulawesi Selatan; 5) Kepulauan Bangka Belitung; 6) Nusa Tenggara Barat; dan 7) Nusa Tenggara Timur. Jumlah kelompok penerima bantuan yang dilakukan evaluasi sebanyak 260 kelompok penerima bantuan dan 263 peserta pelatihan.

1. Evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - a. Pencapaian Tujuan (PT) yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis masing-masing jenis bantuan, dengan bobot 80%;
 - b. Integrasi (IG) yang diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan
 - c. Adaptasi (AT) yang diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.
2. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut diperoleh nilai capaian Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 80,91 dari target 77,5 dengan rincian sebagai berikut:

JENIS BANTUAN	JUMLAH *		SKOR			
	BANTUAN	DIEVALUASI	PT	IG	AT	TOTAL
Mesin Pakan Ikan	40	40	68,88	9,38	4,75	83,00
Karamba Jaring Apung (KJA)	13	13	80,00	10,00	3,46	93,46

JENIS BANTUAN	JUMLAH *		SKOR			
	BANTUAN	DIEVALUASI	PT	IG	AT	TOTAL
Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	59	55	54,82	9,73	5,73	70,27
Excavator	5	5	74,00	10,00	10,00	94,00
Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	10	10	80,00	9,00	8,00	97,00
Kincir	10	10	78,00	10,00	5,50	93,50
TOTAL DJPB	137	133	65,80**	9,62**	5,49**	80,91**

Perbandingan capaian Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2023, tersaji pada grafik di bawah.



Gambar 27. Perbandingan capaian Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2023

IKM 19. Nilai IKPA DJPB

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
95,33	90,90	91,27	92,56	93,75	89,73	96,41	93,76	95,70

*ada perubahan perhitungan di Tahun 2022

Target Capaian IKPA tahun 2023 yang semula 89,05% berubah menjadi 93,75. Penilaian IKPA berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat ketentuan umum bahwa penilaian IKPA terdiri dari 3 parameter yaitu kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Kualitas implementasi perencanaan anggaran terdapat 2 penilaian parameter yaitu revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. Kualitas pelaksanaan anggaran terdapat 5 penilaian parameter yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran terdapat 1 penilaian parameter yaitu Capaian Output.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

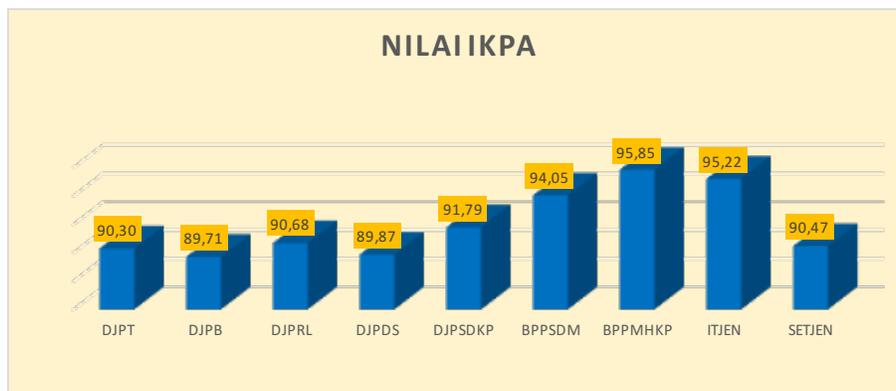
Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	100.00	62.28	78.12	93.39	99.17	97.52	80.00	99.48	89.73	100%	89.73
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	6.23	15.62	9.34	9.92	9.75	4.00	24.87			
			Nilai Aspek	81.14		89.64					99.48			

Permasalahan yang muncul pada capaian IKPA tahun 2023 di mana capaian tersebut tidak mencapai dikarenakan ada dua parameter yang harus disinkronkan yaitu deviasi halaman III DIPA dimana bobotnya sebesar 10% namun tidak tercapai dikarenakan halaman III DIPA lingkup DJPB masih dibagi rata selama 12 bulan dan Kualitas pelaksanaan anggaran pada poin penyerapan anggaran dengan bobot sebesar 20% tidak tercapai dikarenakan terdapat deviasi yang sangat besar dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan November, penyerapan anggaran DJPB terjadi peningkatan yang sangat tinggi pada Bulan Desember sehingga dua parameter tersebut terdapat tidak memenuhi nilai yang diharapkan. Hal ini terjadi karena berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA terdapat formula penilaian penyerapan anggaran berdasarkan table berikut.

	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%
B. Barang	15%	50%	70%	90%
B. Modal	10%	40%	70%	90%
B. Bansos	25%	50%	75%	95%

Perbandingan Capaian IKPA lingkup KKP tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 28. Perbandingan capaian IKPA lingkup KKP Tahun 2023

Rencana Aksi yang perlu dilakukan adalah : Membuat bobot rencana penyerapan anggaran sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA, dan memasukkan angka pada halaman III DIPA sesuai dengan KAK dan RAB Kegiatan yang disusun oleh satker.

IKM 20. Nilai Kinerja Anggaran DJPB

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	68,34	89,89	89,44	86	89,77	104,38	86	104,38

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/ PMK.02/2011. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing- masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing

Capaian indikator ini pada Tahun 2023, yaitu 92,01 atau sebesar 106,99% dari target 86 sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 84/SJ.2/RC.610/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Triwulan IV Tahun 2023.

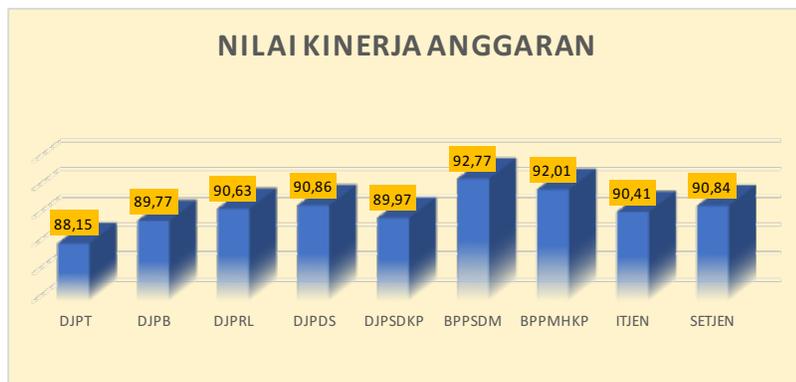
Meskipun mencapai target yang telah ditetapkan, terdapat beberapa catatan permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 antara lain : Adanya revisi anggaran yang disebabkan oleh perubahan rencana kerja (Renja)

Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran di lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, telah dilakukan rapat koordinasi secara rutin untuk melakukan refocusing/penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, pengurangan honorarium tim dan kegiatan, penundaan pelaksanaan

Ditjen Perikanan Budi Daya terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya dengan semakin meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan *stakeholder*. Untuk perbaikan pelaksanaan anggaran BPPMHKP tahun berikutnya, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang

sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara Tim.

Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran lingkup KKP tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 29. Perbandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran lingkup KKP Tahun 2023

IKM 21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	55,26	76,06	77,5	82,28	106,17	80	102,85

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, merupakan suatu indikator yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Metode perhitungannya dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ
6. Presentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan Barang/Jasa

Target nilai yang ditetapkan tahun 2023 untuk IK ini adalah 77,5 (%) dengan capaian 82,28% atau 106,17% dari target yang ditetapkan.

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian IK ini adalah mensosialisasikan Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan PBJ dan BMN kepada Satker lingkup DJPB.

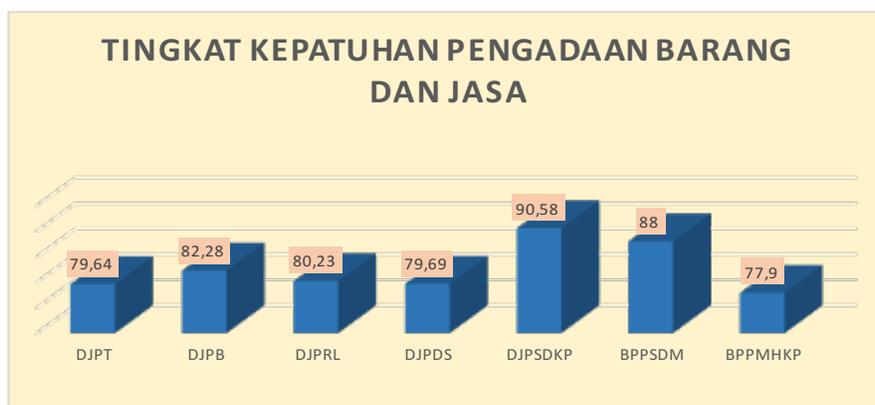
Tindaklanjut atas rencana aksi pada triwulan 4 yakni, telah berkoordinasi dengan satker lingkup DJPB terkait rambu-rambu PBJ maupun hasil evaluasi Itjen atas penyedia pada tahun sebelumnya.

Kendala yang dihadapi yaitu masih kurang ketaatan satker dalam melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa pada tahun berjalan.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah melakukan peningkatan pada beberapa aspek diantaranya yakni:

1. Ketaatan dalam penyediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan
2. Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap kegiatan pengadaan Barang/Jasa

Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa lingkup KKP tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 30. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran lingkup KKP tahun 2023

IKM 22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	80	77,50	77,50	90	120	80	116,25

Indikator Tingkat Pengelolaan BMN lingkup Satker Sekretariat DJPB merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Sekretariat DJPB telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun metode perhitungannya dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Pemanfaatan BMN seperti sewa, KSP, BGS, BSG, pinjam pakai, dan lain lain.

2. Menyusun Rencana kebutuhan BMN
3. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang
4. Tersedianya usulan penghapusan atas BMN yang henti guna dan rusak berat yang diusulkan kepada pengguna Barang maupun Pengelolaan Barang yang akan dilakukan penjualan dengan lelang atau tanpa lelang, dan dengan pemusnahan
5. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian.
6. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu, akuntabel dan efisien
7. Melakukan Verifikasi atas usulan BAST 526xxx pada satker pusat yang akan ditandatangani oleh KPB satker Pusat.
8. Melakukan monitoring dan pembinaan Laporan BMN di seluruh satker DJPB

Adapun permasalahan yang harus muncul dan harus diselesaikan sebagai berikut:

1. Masih terdapat BMN henti guna dan rusak berat yang masih tercatat di dalam laporan BMN.
2. Masih terdapat belanja barang persediaan yang menggunakan akun belanja 526xxx masih tercatat di periode 31 Desember 2023 yang harus diterbitkan BAST agar dapat dikeluarkan di TA. Berikutnya
3. Terhadap asset yang berada di seluruh satker UPT DJPB masih belum di usulkan penetapan status penggunaan (PSP) kepada pengguna Barang atau Pengelola Barang.
4. Terhadap Aset yang tercatat di didalam Laporan BMN satker Dekonsentrasi harus dilakukan usulan hibah kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan setempat
5. Masih diperlukan pengamanan asset berupa terutama alat pengolah data, Tanah dan kendaraan yang sangat rentan dikuasi oleh pihak lain.
6. Tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Jenderal atas Pengelolaan BMn dan penatausahaan BMN.

Target nilai yang ditetapkan tahun 2023 untuk IK ini adalah 77,5 % dengan capaian 93 % atau 120% dari target.

Sedangkan realisasi dukungan anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L masuk pada kegiatan Layanan BMN dengan capaian yakni sebesar 99,99% dari anggaran sebesar Rp 724.900.000

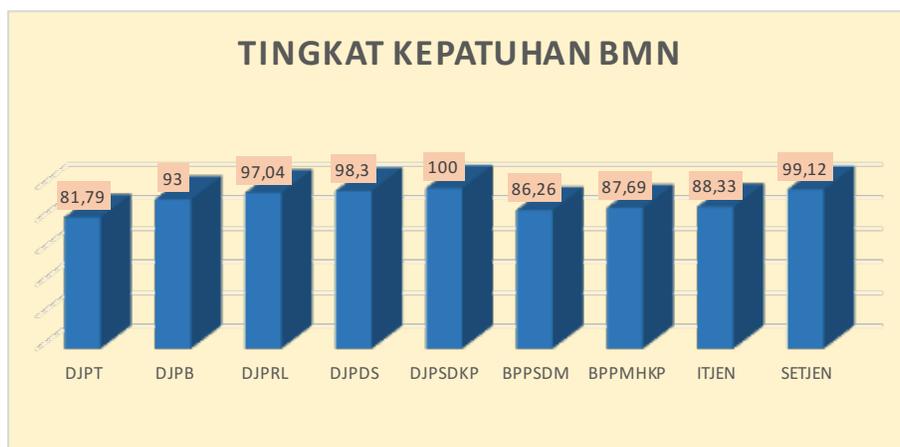
Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian IK ini adalah mensosialisasikan Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja pengelolaan BMN kepada Satker lingkup DJPB.

Kendala yang dihadapi yaitu masih kurang ketaatan satker dalam melaksanakan proses pengelolaan BMN pada tahun berjalan.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah melakukan peningkatan pada beberapa aspek diantaranya yakni:

1. Melakukan pengamanan BMN dari aspek administrasi, pencatatan, dan hukum
2. Memanfaatkan RKBMN dalam penyusunan RKA-K/L tahun berikutnya.
3. Mendorong usulan penetapan status penggunaan (PSP) BMN satker untuk ditetapkan PSP nya oleh Kementerian Keuangan.
4. Mendorong percepatan penghapusan BMN rusak berat pada satker lingkup DJPB.
5. Melakukan inventarisasi atas BMN yang akan dilakukan pengelolaannya seperti penghapusan, PSP, Pemanfaatan, Hibah yang usulannya ditujukan kepada Pengguna Barang atau Pengelola Barang
6. Melakukan penyusunan dan penyampaian laporan BMN secara tepat waktu.
7. Melakukan update data aplikasi Siman terhadap PSP yang sudah terbit SK
8. Melakukan revisi RKBMN pada tahun anggaran berjalan
9. Menyelesaikan tindak lanjut temuan LHP terhadap BMN lingkup DJPB

Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan BMN lingkup KKP tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 31. Grafik Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan BMN lingkup KKP tahun 2023

IKM 23. Tingkat kepatuhan Pengelolaan Data

Realisasi				2023			Renstra 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
	-	-	-	90	99,47	110,52	92	108,12

*iku baru tahun 2023

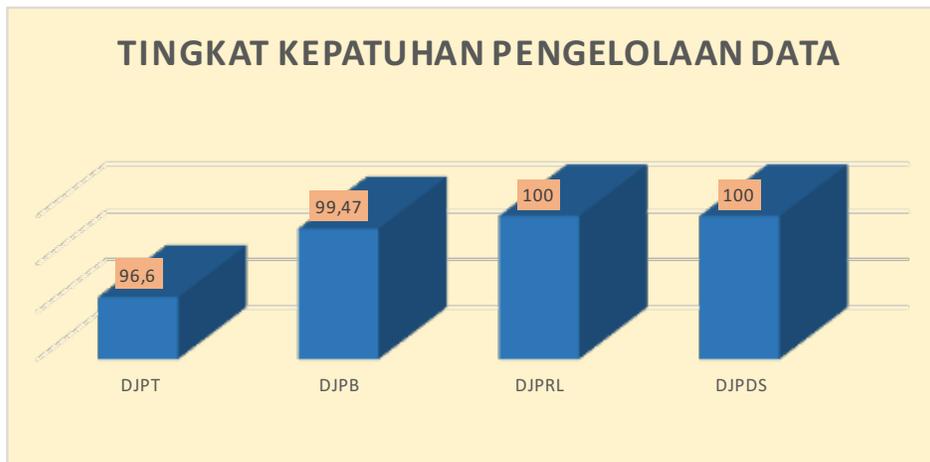
Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan.

Untuk menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu:

1. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (X1), Bobot Nilai (30%)
2. Persentase Data Produksi KP yg Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 40%.
3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3), Bobot Nilai 30%

Capaian IKU *Mandatory* Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2023 adalah 99,47% atau mencapai.. dari target 90. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena baru ada di tahun 2023

perbandingan capaian iku tingkat kepatuhan pengelolaan data Lingkup KKP Tahun 2023 tersaji pada gambar berikut.



Gambar 32. Grafik perbandingan capaian iku tingkat kepatuhan pengelolaan data Lingkup KKP Tahun 2023

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mensosialisasikan SOP dalam entry data KUSUKA melalui aplikasi satudata kepada enumerator DJPB terutama enumerator yang masih baru dan baru ditugaskan sebagai enumerator;
2. Berkoordinasi dengan validator dinas kabupaten kota agar segera melakukan validasi data terutama data KUSUKA blok khusus;

3. Berkoordinasi dengan Pusluh dan Penyuluh yang ditugaskan sebagai enumerator perikanan Budi Daya untuk melakukan percepatan entry data KUSUKA;
4. Berusaha untuk melakukan pembayaran BOP pengumpulan data KUSUKA secara tepat waktu.

Kendala yang dihadapi yaitu:

1. Coverage lokasi pengumpulan data KUSUKA yang cukup luas;
2. Kondisi jaringan internet yang tidak merata di setiap daerah;
3. Tingkat pemahaman enumerator yang tidak sama;
4. Rasio antara enumerator dan jumlah responden yang belum memadai.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Pusdatin agar segera menyediakan aplikasi yang tidak tergantung pada ketersediaan jaringan sehingga entry data bisa dilakukan dari mana saja;
2. Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mempercepat proses pembayaran honor enumerator.

3.2. Efisiensi

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK nomor 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran Sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20}\right) \times 50$$

NE = Nilai Efisiensi

Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai efisiensi dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus transformasi sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum (PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{\sum (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

E = Efisiensi

PAK_i = Pagu anggaran keluaran i

Dengan menggunakan formulasi tersebut, diperoleh angka efisiensi anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya pada Tahun 2022 sebesar 1,07% dari skala maksimal 20%. Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi tersebut, kemudian ditransformasikan sehingga diperoleh angka nilai efisiensi anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 68,52% dari skala maksimal 100%.

No.	Kode Eselon I	Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CKP	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Rata Rata Sarker
1		Subsistem Jendera	90.84	100.00	94.98	85.38	100.00	11.69	79.225	84.71
2		Inspektariat Jendera	90.41	99.50	99.64	99.67	100.00	0.36	50.9	85.86
3		Eselon Perikanan Tangkap	88.15	100.00	96.75	97.83	92.25	-2.75	43.125	83.07
4		Eselon Perikanan Budidaya	89.77	98.51	98.76	87.28	100.00	1.07	52.675	85.85
5		Eselon Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	89.97	100.00	99.60	91.04	100.00	3.68	59.2	84.38
6		Eselon Pengawasan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	90.86	100.00	98.91	96.08	100.00	5.25	63.125	85.51
7		Eselon Pengawasan Peningkatan	90.63	100.00	96.49	89.15	100.00	7.19	67.975	85.09
8		Badan Kajian dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	92.77	100.00	97.95	96.57	100.00	18.02	95.05	86.29
9		Badan Kajian dan Pengembangan Ilmu dan Teknologi Hasil Perikanan	92.01	100.00	98.36	95.53	100.00	9.56	73.9	86.82

Gambar 33. Schreen shoot Nilai Efisiensi Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2023 pada aplikasi SMART DJA

Hal ini membuktikan Ditjen Perikanan Budidaya sebagai salah satu unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah melakukan efisiensi anggaran dan termasuk dalam kategori cukup baik Ditjen Perikanan Budidaya telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas. Di samping itu, juga telah melakukan langkah streamlining pertemuan atau sidang ke UPT melalui fasilitas video confrence, serta melakukan langkah efisiensi terkait penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, pengurangan biaya perjalanan dinas, dan moratorium pengadaan tanah baru. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong Ditjen Perikanan Budi Daya untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi perikanan Budi Daya namun tetap menjaga kualitas kinerja.

3.3. Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran APBN 2023 pada Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebesar Rp1.181.634.862.000,- Berdasarkan data dari *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dan mengalami revisi menjadi Rp1.100.237.305.000,- sampai dengan tahun 2023, realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya telah tercapai sebesar Rp1.087.136.906.277,- (98,81%), menurun secara nilai dan persentase bila dibandingkan tahun

2022 pada triwulan yang sama yaitu sebesar 0,23%. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2023 dan 2022

Tabel 11. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2021 dan 2022

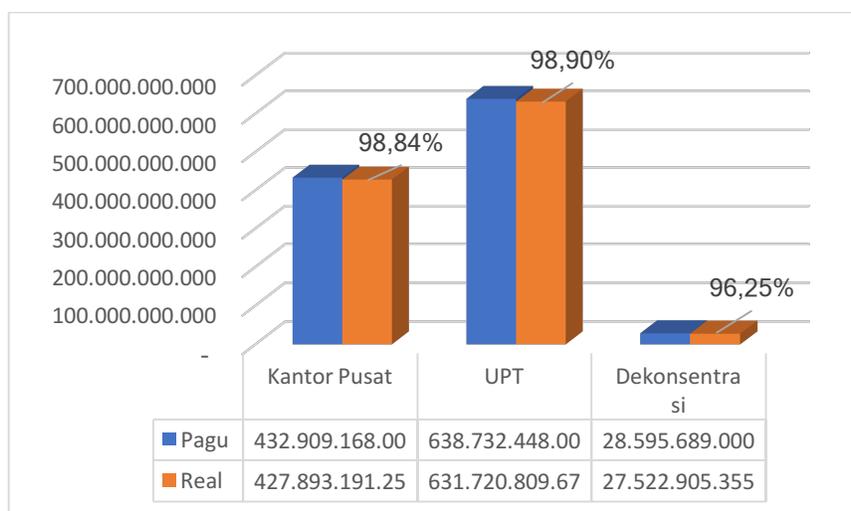
Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2022	953.833.625.000,-	944.650.891.776,-	99,04
2023	1.100.237.305.000,-	1.087.136.906.277,-	98,81

Pembagian alokasi pagu anggaran Ditjen Perikanan Budidaya tersebut menurut jenis belanja yaitu : (i) Belanja Pegawai sebesar Rp168.653.178.000,-; (ii) Belanja Barang sebesar Rp807.237.488.000; dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp124.346.639.000,-.

Tabel 12. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja Tahun 2022 dan 2023

Jenis Belanja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (RP)	%
Pegawai	187.063.301.000	180.690.614.282	99,25	168.653.178.000	165.462.819.652	98,11
Barang	560.777.298.000	553.682.203.073	98,73	807.237.488.000	797.757.879.989	98,83
Modal	210.993.026.000	210.278.074.421	99,66	124.346.639.000	123.916.206.636	99,65
Total	953.833.625.000	944.650.891.766	99,04	1.100.237.305.000	1.087.136.906.277	98,81

Prosentase anggaran belanja Ditjen Perikanan Budidaya sampai dengan triwulan IV tahun 2023 berdasarkan tabel di atas cukup proporsional karena didominasi oleh Belanja Pegawai dan Belanja Barang, sedangkan untuk Belanja Modal cukup rendah meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.



Gambar 34. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terbesar yaitu pada Satker UPT (98,90%), sedangkan yang terendah yaitu pada satker Dekon Provinsi (96,25%) sebagaimana berikut

1. Satker Pusat

Realisasi anggaran pada satker Pusat sebesar 98,84%, dengan adanya aturan satu dipa maka satker pusat seluruhnya tergabung dalam satu satker.

2. Satker UPT

Realisasi anggaran pada satker UPT keseluruhan sebesar 98,90%, dengan capaian terbesar terdapat pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin 99,95% dan terendah pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara 96,23%

3. Satker Dekonsentrasi Provinsi

Realisasi anggaran pada satker Dekonsentrasi Provinsi keseluruhan sebesar 96,25%, dengan capaian terbesar pada satker DKP Sulawesi Tengah dan DKP Kepri sebesar 99,95%, dan terendah pada satker DKP Kalimantan Timur 79,21%.



BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sepanjang Tahun 2023 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan seluruh *stakeholder*.

Tahun 2023 ini penuh dengan tantangan, dimana setiap unit kerja dituntut untuk melakukan inovasi, perbaikan dan adaptasi terhadap tata cara dan mekanisme kerja. Hal tersebut perlu dilakukan untuk tetap menjaga pencapaian target kinerja ditengah ketidakpastian ekonomi global dan ruang fiskal. Rencana Aksi di Tahun 2023 yang telah disusun terus dilaksanakan dan dievaluasi berkala untuk mempertahankan prestasi kinerja organisasi. Banyak hal yang perlu dilakukan pembenahan terkait kesetjanaan antara lain : pembenahan tata kerja menuju birokrasi yang agile dan berkelas dunia, pemanfaatan teknologi dan informasi, digitalisasi, inovasi-inovasi baru serta digital *awareness* bagi setiap pegawai/pejabat. Semua tahapan untuk pencapaian target kinerja dievaluasi bersama untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi agar kinerja tetap terjaga.

Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya merupakan hasil kerja keras seluruh unit kerja dan beberapa penghargaan yang telah berhasil diraih/dipertahankan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menjadi hasil dari kerja keras, dan dedikasi seluruh pegawai dalam rangka menjaga semangat mendukung pencapaian visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tetap optimis sebagai unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Rekomendasi

Dalam penyusunan laporan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya tahun 2023, terdapat beberapa permasalahan baik dari aspek perencanaan kinerja maupun aspek evaluasi kinerja. Adapun permasalahan tersebut yaitu data capaian kinerja masih berupa matriks/rekapitulasi data

pengolahan, sehingga dibutuhkan legalitas data tersebut dengan persetujuan pimpinan unit kerja;

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya , diperlukan beberapa rencana aksi atas tindak lanjut hasil evaluasi kinerja tahun 2023, antara lain meningkatkan validitas data dukung capaian kinerja sesuai dengan metode pengukuran indikator yang telah disusun dengan memperhatikan legalitas data dukungnya.



Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Gedung Minabahari IV Lantai 5 - 8
Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat